

**PENGARUH TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KONEKSI POLITIK
SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN
SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2022-2024**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana Terapan pada Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Silvy Nabila

40011422650288

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
AKUNTANSI PERPAJAKAN
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2026**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama Penyusun : Silvy Nabila

Nomor Induk Mahasiswa : 40011422650288

Fakultas : Sekolah Vokasi

Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Judul Tugas Akhir : Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap
Penghindaran Pajak Dengan Koneksi Politik
Sebagai Variabel Moderasi Pada Sektor Perbankan
yang terdaftar di BEI Tahun 2022-2024

Semarang, 9 Juli 2026

Dosen Pembimbing



Drs. Dul Muid, M.si.,Akt.

NIP. 1196505131994031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Silvy Nabila

Nomor Induk Mahasiswa : 40011422650288

Fakultas : Sekolah Vokasi

Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Judul Tugas Akhir : Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap
Penghindaran Pajak Dengan Koneksi Politik
Sebagai Variabel Moderasi Pada Sektor Perbankan
yang terdaftar di BEI Tahun 2022-2024

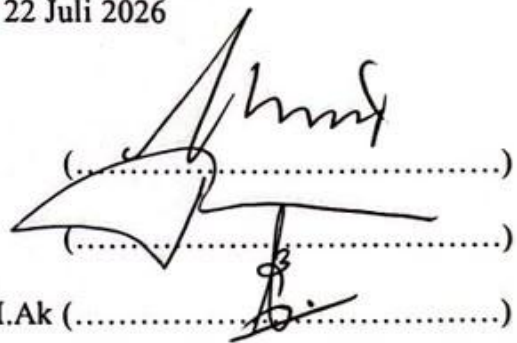
Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 22 Juli 2026

Tim Penguji:

1. Drs. Dul Muid, M.Si. Akt

2. Apip, SE., M.Si

3. Alvionia Filda Sari Mareta, SE., M.Ak



(.....)

(.....)

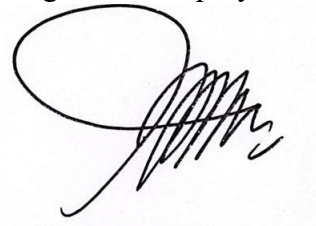
(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Silvy Nabila, menyatakan bahwa tugas akhir dengan judul: “ **Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Penghindaran Pajak dengan Koneksi Politik Sebagai Variabel Moderasi** ” yang disusun untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tugas akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhann tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila saya melakuakn tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun ttidak, dengan ini saya sendiri menyatakan menarik tugas akhir yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Semarang, 9 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Silvy Nabila

NIM. 40011422650288

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial menggunakan dana pengeluaran sosialnya untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini juga menguji apakah koneksi politik memoderasi hubungan antara tanggung jawab sosial dengan penghindaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024, menggunakan data sekunder dimana data didapatkan dari *website* Bursa Efek Indonesia dan *website* resmi masing-masing perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2024 dengan total sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 93 dari tahun 2022-2024. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi moderasi yang datanya diolah menggunakan *software* SPSS versi 25. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengeluaran CSR perusahaan maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya, dimana ini mendukung teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) dimana semakin baik citra perusahaan dimata masyarakat maka kecil kemungkinan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa koneksi politik melemahkan peran CSR terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyiratkan bahwa hubungan politik membuat perusahaan tidak bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan dengan koneksi politik yang kuat cenderung menjadi lebih agresif dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan koneksi politik yang lemah bertanggung jawab secara sosial dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ikatan politik yang kuat.

Kata kunci : penghindaran pajak, tanggung jawab sosial, koneksi politik, efek moderasi, industri perbankan

ABSTRACT

This study aims to determine whether socially responsible companies use their social expenditure funds to engage in tax avoidance practices. This study also examines whether political connections moderate the relationship between social responsibility and tax avoidance. The population used in this study consists of companies in the banking sector listed on the Indonesia Stock Exchange from 2022 to 2024, using secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange website and the official websites of each banking sector company listed on the Indonesia Stock Exchange from 2022 to 2024, with a total sample size of 93 companies from 2022 to 2024. The analytical method used in this study is moderation regression analysis, with data processed using SPSS version 25. This study shows that the higher a company's CSR expenditures, the lower its level of tax avoidance, which supports stakeholder theory—namely, that the better a company's image in the eyes of the public, the less likely it is to engage in tax avoidance practices. This study also shows that political connections weaken the role of CSR in tax avoidance. This implies that political ties make companies less socially responsible. Companies with strong political connections tend to be more aggressive in their tax avoidance practices. Companies with weak political connections are more socially responsible than those with strong political ties.

Key words: tax avoidance, social responsibility, political connections, moderation effect, banking industry

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini dengan baik dan tepat tanpa adanya hambatan yang berarti. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan di Program Studi Akutansi Perpajakan, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dihadapi. Oleh karena itu, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang berada disekitar penulis tentunya sangat berarti bagi penulis. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharmono, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi mahasiswa dalam menempuh pendidikan tinggi di lingkungan akademik yang berkualitas.
2. Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si. selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan dukungan penuh bagi seluruh mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi akademik dan profesional.
3. Apip, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akutansi Perpajakan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan arahan serta memfasilitasi seluruh kegiatan akademik yang mendukung keberhasilan mahasiswa.

4. Dul Muid, M.Si.,Akt. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah memberikan bimbingan, dukungan, serta pengarahan yang sangat berarti bagi saya. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.
5. Dosen penguji dan seluruh dosen Program Studi Akuntansi Perpajakan, yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman akademik yang sangat bermanfaat dan berarti bagi perjalanan saya.
6. Bapak dan Ibu penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis serta senantiasa menjadi pendengar dan pemberi saran yang berguna bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi. Skripsi ini adalah hasil dari kerja keras, tetapi juga cerminan dari doa dan perjuangan kedua orang tua penulis yang tidak pernah berhenti memperjuangkan pendidikan saya.
7. Wiwik Dian Wikanti dan Ibrahim selaku kakak dan adik penulis yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
8. Habib Muhammad Mustofa bin Hasan Alaydrus selaku guru penulis yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, nasihat, serta doa kepada penulis.
9. Sahabat penulis, Arsyanda, Karlita, dan Marsha yang sudah selalu mendoakan dan mendukung satu sama lain untuk mencapai impian masing masing.

10. ‘Comot’ , zeha, keysha, dan salma, selaku sahabat penulis yang sudah selalu memberikan dukungan dan menemani selama masa perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini selesai.
11. Seluruh pihak lain yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan dan terus melangkah hingga berada di titik ini. Perjalanan menyelesaikan skripsi ini tidak selalu mudah. Ada rasa lelah, kecewa, ragu, dan berbagai rintangan yang terkadang membuat langkah terasa begitu berat. Namun, di tengah semua itu, penulis tetap berusaha bangkit dan melanjutkan perjalanan, meskipun harus berjalan dengan langkah yang perlahan. Terima kasih karena telah bersedia berjuang, percaya bahwa setiap usaha akan menemukan jalannya, dan menjadikan setiap kegagalan maupun kesulitan sebagai pelajaran yang berharga.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa pendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi yang berguna, khususnya bagi mahasiswa yang akan dilaksanakan kegiatan serupa. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	17
1.3.1 Tujuan Penelitian	17
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	17
1.4 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II	20
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	20
2.1.1 Teori Pemangku Kepentingan.....	20
2.1.2 Penelitian Terdahulu	24
2.2 Kerangka Penelitian	32
2.3 Hipotesis Penelitian.....	33
2.3.1 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Penghindaran Pajak.....	34
2.3.2 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Hubungan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan Penghindaran Pajak.....	35
BAB III.....	37
3.1 Definisi Operasional Variabel.....	37
3.1.1 Variabel Dependen.....	37
3.2.1 Variabel Independen	38
3.3.1 Variabel Moderasi.....	39
3.4.1 Variabel Kontrol.....	40

3.2	Populasi dan Sampel	43
3.3	Jenis dan Sumber Data	45
3.4	Metode Pengumpulan Data	45
3.5	Metode Analisis	46
3.5.1	Uji Statistik Deskriptif	46
3.5.2	Asumsi Klasik	46
3.5.3	Analisis Regresi Moderasi	49
3.5.4	Uji Hipotesis	50
BAB IV		53
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	53
4.2	Analisis Data	54
4.2.1	Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	54
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	58
4.2.3	Hasil Uji Analisis Moderasi	67
4.2.4	Hasil Uji Hipotesis	69
4.3	Interpretasi Hasil	75
4.3.1	Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Penghindaran Pajak	75
4.3.2	Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Hubungan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan Penghindaran Pajak	75
BAB V		78
5.1	Kesimpulan	78
5.2	Keterbatasan	79
5.3	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		81
DAFTAR LAMPIRAN		86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	33
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Histogram.....	59
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Normal P-P Plot	60
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Grafik Plot.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Indonesia dari Pajak dan Bukan Pajak.....	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3. 1 Firma Audit BIG 4	43
Tabel 4. 1 Sampel Penelitian.....	53
Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	55
Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S)	61
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	62
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi Menggunakan Metode Run Test.....	64
Tabel 4. 6 Hasil Uji Glejser.....	66
Tabel 4. 7 Koefisin Regresi.....	68
Tabel 4. 8 Tabel Uji Statistik F	69
Tabel 4. 9 Model Summary Regresi Moderasi	70
Tabel 4. 10 Hasil Uji Statistik T.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Nama Perusahaan Sampel	86
Lampiran 2 Tabulasi Data Variabel	87
Lampiran 3 Hasil Olah Data SPSS.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masing-masing negara mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini juga tertulis dalam cita-cita bangsa Indonesia yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni, memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu cara yang mampu dilakukan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bangsa tersebut adalah dengan melakukan pembangunan negara baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian nasional. Prasetya & Mutmainah (2024) menjelaskan bahwa pelaksanaan berbagai program kerja pemerintah membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai agar dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan pendanaan tersebut direncanakan dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pendapatan negara berasal dari tiga sumber utama, yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Di antara ketiga sumber tersebut, pajak menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan negara karena memberikan penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan PNBP maupun hibah setiap tahunnya. Hal ini menjadikan penerimaan pajak memberikan peran yang penting dalam pembangunan sebuah negara. Memaksimalkan kepatuhan dan memperluas basis pajak adalah hal yang esensial untuk meningkatkan kapasitas keuangan negara (Prasetya & Mutmainah, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa. Meskipun wajib pajak tidak memperoleh imbalan secara langsung, penerimaan pajak dimanfaatkan oleh negara untuk membiayai berbagai kebutuhan demi tercapainya kemakmuran rakyat (BPK RI, 2008).

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang berperan besar dalam membiayai kegiatan pemerintahan serta mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (fungsi anggaran), pajak juga berperan sebagai instrumen pemerintah dalam mengatur kondisi sosial dan ekonomi masyarakat (fungsi regulasi). Melalui fungsi tersebut, pemerintah dapat menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi terhadap barang-barang tertentu, seperti minuman berakohol dan barang mewah, guna mencapai tujuan kebijakan ekonomi maupun sosial (Putri, 2024).

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Indonesia dari Pajak dan Bukan Pajak Tahun 2022-2024 (Miliar Rupiah)

Keterangan	2022	2023	Growth 2023 (%)	2024	Growth 2024 (%)
Penerimaan Pajak	2.034.552,50	2.118.348,00	4,12	2.309.859,80	9,04
Penerimaan Bukan Pajak	595.594,50	515.800,90	-13,40	492.003,10	-4,61
Total Pendapatan Negara	2.630.147,00	2.634.148,90		2.801.862,90	

Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1, penerimaan pajak negara menunjukkan tren peningkatan selama periode 2022–2024. Pada tahun 2023, penerimaan pajak meningkat sebesar 4,12% dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut didorong oleh masih berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 yang meningkatkan aktivitas konsumsi, investasi, dan kinerja dunia usaha. Selain itu, implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), penguatan pengawasan perpajakan, digitalisasi administrasi perpajakan, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak (Kementerian Keuangan RI, 2024; Badan Pusat Statistik, 2025).

Selanjutnya, pada tahun 2024, penerimaan pajak kembali mengalami peningkatan sebesar 9,04% dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin efektifnya kebijakan fiskal pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, perluasan basis pajak (*tax base*), penguatan reformasi administrasi perpajakan, serta meningkatnya aktivitas ekonomi pada sektor industri, perdagangan, dan jasa. Optimalisasi penerimaan pajak juga didukung oleh perbaikan sistem administrasi perpajakan melalui transformasi digital yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (Kementerian Keuangan RI, 2025; OECD, 2024).

Berbeda dengan penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan tren penurunan selama periode penelitian. Pada tahun 2023, PNBP mengalami penurunan sebesar 13,40% dibandingkan tahun 2022. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya harga beberapa komoditas unggulan di pasar internasional yang berdampak pada menurunnya penerimaan dari sektor sumber daya alam. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan penurunan sebesar 4,61% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa PNBP masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global dan kinerja sektor ekstraktif (Badan Pusat Statistik, 2025; Kementerian Keuangan RI, 2025).

Meskipun penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak mengalami dinamika yang berbeda setiap tahunnya, kontribusi penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara tetap jauh lebih besar dibandingkan penerimaan bukan pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pajak masih menjadi sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran strategis

dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta penyediaan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penguatan pengawasan untuk meminimalkan praktik *tax avoidance* yang berpotensi mengurangi penerimaan negara (OECD, 2024; Kementerian Keuangan RI, 2025).

Sebagai sumber penerimaan negara terbesar, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak agar kebutuhan pembiayaan negara dapat terpenuhi. Dengan begitu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi hal yang penting agar pemerintah memiliki kemampuan dalam membiayai dan menjalankan berbagai program pembangunan nasional. Apabila praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) terus berlangsung, penerimaan negara berpotensi menurun kemudian itu dapat menghambat pelaksanaan program-program pembangunan (Dewi, 2023). Namun demikian, masih terdapat wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi, yang berupaya mengurangi beban pajaknya melalui berbagai cara. (Ryandono et al., 2020).

Stawati (2020) menjelaskan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi yang diterapkan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku tanpa melakukan pelanggaran hukum. Praktik ini umumnya dianggap legal karena memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum. Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Yang termasuk tindakan

ilegal karena dilakukan dengan menyalahi aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Salah satu tantangan yang masih dihadapi Indonesia dalam sektor perpajakan adalah besaran tarif pajak. Dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah dan negara maju, tarif pajak di Indonesia masih tergolong relatif rendah (Murtina et al., 2020). Tarif pajak Indonesia sekitar 12% lebih rendah dibandingkan negara berpenghasilan menengah yang berkisar 14-15% dan negara maju yang mencapai 24-26%. kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak. Jika praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan dan pengelolaan perpajakan semakin baik, maka penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan dapat terus meningkat.

Hampir semua negara yang memiliki kegiatan bisnis tidak lepas dari permasalahan penghindaran pajak, termasuk Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah masih dihadapkan pada praktik penghindaran pajak yang menjadi salah satu tantangan di bidang perpajakan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Malik Abdul et al., (2020) Mengatakan bahwa diperkirakan praktik penghindaran pajak di Indonesia menyebabkan potensi kehilangan penerimaan negara sebesar Rp 110 triliun setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% dari wajib pajak badan, sedangkan sisanya dari wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada praktik penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan sektor perbankan. Sektor perbankan dipilih karena memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan nasional (Uddin *et al.*, 2018). Selain itu, perusahaan perbankan juga termasuk sektor yang cukup sering dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak (Fanggidae *et al.*, 2023). Salah satu strategi yang umum digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak adalah tax avoidance. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan dan celah dalam regulasi perpajakan secara legal sehingga jumlah pajak yang terutang dapat diminimalkan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi tersebut umumnya memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan maupun kebijakan akuntansi yang masih diperbolehkan. Dalam praktiknya perusahaan dapat meningkatkan pengakuan biaya atau beban sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih kecil. Akibatnya, kondisi keuangan perusahaan dapat terlihat kurang menguntungkan, bahkan seolah olah mengalami kerugian, meskipun kondisi sebenarnya belum tentu demikian.

Fenomena yang berkaitan dengan praktik tax avoidance juga pernah menjadi sorotan pada PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank). Kasus yang terungkap pada tahun 2021 bermula dari hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak atas Tahun Pajak 2016 yang menunjukkan adanya potensi kekurangan pembayaran pajak. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap *General Ledger*, perhitungan bunga, dan Penyisihan

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), nilai kekurangan pembayaran pajak meningkat secara signifikan. Dalam proses pemeriksaan tersebut, terungkap adanya dugaan upaya perusahaan untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang dapat menurunkan besaran pajak yang harus dibayarkan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kecenderungan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak guna meningkatkan laba setelah pajak, menjaga efisiensi arus kas, dan mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan. Meskipun perkara yang diproses secara hukum berfokus pada pelanggaran dalam proses pemeriksaan pajak, kasus ini tetap menjadi salah satu contoh yang sering dikaitkan dengan fenomena tax avoidance, karena mencerminkan adanya upaya untuk mengurangi kewajiban perpajakan perusahaan (CNN Indonesia, 2021).

Keberadaan sektor perbankan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Kehadiran bank tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dana masyarakat, tetapi juga menyediakan berbagai layanan keuangan, seperti tabungan, deposito, dan fasilitas kredit yang dapat membantu masyarakat maupun pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan. Pitter Abdullah (2022) menjelaskan bahwa sektor perbankan merupakan salah satu penggerak utama perekonomian karena berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi tersebut terlihat melalui peran perbankan dalam mendorong konsumsi, investasi, serta kegiatan ekspor di Indonesia

Besarnya peran sektor perbankan juga tercermin dari kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi. Salah satu sumber pendapatan tersebut berasal dari kewajiban perpajakan yang dibayarkan perusahaan kepada negara. Penerimaan pajak tersebut kemudian dimanfaatkan pemerintah sebagai sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Ginting, 2025).

Praktik penghindaran pajak pada perusahaan perbankan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari karakteristik perusahaan maupun kebijakan yang diterapkan (Justin et al., 2025). Salah satu faktor yang diduga memengaruhi tindakan tersebut adalah penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui penerapan CSR perusahaan berupaya menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab dengan memberikan perhatian terhadap kepentingan sosial, lingkungan, serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selain sebagai wujud kepedulian sosial, pengungkapan CSR juga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan.

Pengungkapan CSR pada setiap perusahaan dapat berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan perusahaan, tujuan yang ingin dicapai, serta nilai-nilai yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan (Justin et al., 2025). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak terlepas dari karakteristik tata kelola yang diterapkan.

Semakin baik tata kelola perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosialnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap keputusan yang dibuat perusahaan akan menjadi bahan pertimbangan dan perhatian bagi pemegang saham maupun para pemangku kepentingan lainnya. Hal tersebut terutama berkaitan dengan seberapa besar komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya terhadap lingkungan dan masyarakat agar mampu membangun kepercayaan serta menjaga reputasi perusahaan. Meskipun perusahaan tidak memiliki kewajiban sosial secara langsung, penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dimanfaatkan sebagai salah satu strategi perusahaan yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Praktik ini tentunya dapat didukung oleh koneksi politik di belakangnya. Perusahaan yang secara konsisten menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menunjukkan kecenderungan yang lebih rendah untuk melakukan praktik perpajakan yang agresif, karena CSR mencerminkan komitmen perusahaan terhadap etika bisnis, transparansi, dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (Ozbay et al., 2023). Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi salah satu informasi yang dipertimbangkan oleh investor sebelum mengalokasikan dananya pada

suatu perusahaan. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menilai kelayakan perusahaan sebagai tujuan investasi.

Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang memiliki keterkaitan politik menjadi salah satu komponen yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi berbagai kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Keberadaan koneksi politik sering dikaitkan dengan peluang perusahaan untuk memperoleh keuntungan tertentu yang berpotensi mendorong praktik penghindaran pajak (Aulin et al., 2024). Namun, hubungan politik tidak selalu berarti perusahaan akan melakukan tindakan tersebut, karena masih terdapat faktor lain yang turut memengaruhi keputusan perusahaan.

Di sisi lain, tata kelola perusahaan (*corporate governance*) memiliki fungsi penting dalam mengarahkan perusahaan agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Tata kelola perusahaan yang baik diharapkan mampu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan sehingga berbagai tindakan yang dapat merugikan pemangku kepentingan, termasuk praktik penghindaran pajak yang berlebihan, dapat dicegah (Rika Rudiartun, 2023).

Tanggung jawab sosial merupakan wujud komitmen perusahaan dengan kegiatan bisnis perusahaan untuk berlaku sesuai norma, turut andil dalam pengembangan ekonomi, juga dapat meningkatkan kualitas

hidup masyarakat (Aulin et al., 2024). Pembayaran pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Selain itu, pajak yang dibayarkan menjadi salah satu bentuk dukungan perusahaan terhadap pembangunan nasional karena penerimaan tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk membiayai berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif etika bisnis, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan usaha secara jujur dan bertanggung jawab. Komitmen tersebut diharapkan dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Aulin et al., (2024) menyatakan bahwa motivasi normatif berfokus pada dorongan untuk melaksanakan tanggung jawab perusahaan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika. Dengan motivasi tersebut, perusahaan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta mendukung terciptanya kesejahteraan bersama. Sementara itu, motivasi strategis memiliki tujuan yang berbeda dengan motivasi normatif. Pada motivasi ini, perusahaan menjalankan program CSR untuk memperoleh manfaat bagi perusahaan, misalnya meningkatkan reputasi, menjaga nama baik, dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat maupun investor. Dengan demikian, CSR dapat digunakan sebagai strategi untuk membentuk citra positif perusahaan. Dalam beberapa kasus, citra tersebut

dimanfaatkan untuk mengurangi perhatian terhadap aktivitas perusahaan yang kurang sesuai dengan prinsip etika, seperti praktik penghindaran pajak.

Penelitian mengenai hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan penghindaran pajak sudah cukup banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada perusahaan di negara maju, sehingga penelitian pada negara berkembang, termasuk Indonesia, masih perlu dikembangkan. Salah satu penyebab kondisi tersebut adalah belum optimalnya komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip etika pada setiap kegiatan bisnis yang dilakukan. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga banyak ditemukan pada perusahaan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Arus keuangan ilegal (*illicit financial flows* atau IFF) masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi negara-negara berkembang. Rashid et al. (2022) menyebutkan bahwa setiap tahunnya negara berkembang diperkirakan mengalami kerugian sebesar 660–870 miliar euro akibat praktik tersebut. Selain itu, Global Financial Integrity (2021) melaporkan bahwa kerugian yang dialami negara berkembang mencapai sekitar 20% dari total nilai perdagangan dengan negara-negara maju. Tingginya kerugian yang ditimbulkan akibat praktik penghindaran pajak menunjukkan bahwa isu ini masih perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perusahaan menyikapi praktik penghindaran pajak, serta apakah penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mampu menekan praktik tersebut, terutama ketika perusahaan memiliki koneksi politik.

Adanya koneksi politik dapat memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak-pihak politik cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh risiko pemeriksaan yang relatif lebih rendah, kemudahan memperoleh informasi terkait perubahan regulasi, tingkat transparansi yang tidak terlalu ketat, serta biaya yang lebih kecil dalam melakukan praktik penghindaran pajak (Kim & Zhang, 2021). Perusahaan yang memiliki hubungan politik cenderung dianggap memperoleh dukungan dalam menghadapi risiko tertentu, termasuk risiko yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang agresif (Duchin & Sosyura, 2012). Dengan koneksi politik perusahaan cenderung lebih berani menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif. Hal ini karena hubungan politik dapat memberikan berbagai keuntungan, seperti kemudahan dalam menghadapi perubahan regulasi maupun risiko yang lebih rendah terhadap pelanggaran ketentuan perpajakan di masa mendatang. Rashid et al. (2022).

Dalam pelaksanaannya, sistem perpajakan di Indonesia berpedoman pada prinsip kebersamaan atau gotong royong. Pada awal 1984, Indonesia telah mengadopsi sistem *self-assessment* yang dimana ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan pemeriksaan, menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terutang secara mandiri. Fungsi kewenangan yurisdiksi perpajakan digunakan untuk memberikan pembinaan, pendalaman, pengendalian, pengawasan, serta penegakan

sanksi. Optimalnya penerapan sistem self-assessment sangat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat, oleh karena itu pemahaman dan wawasan perpajakan perpajakan harus terus ditingkatkan secara konsisten. Kepercayaan masyarakat terhadap otoritas perpajakan perlu ditingkatkan melalui tata kelola institusi yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan otoritas perpajakan, semakin tinggi pula *tax morale* dan kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (OECD, 2022).

Lembaga perpajakan memiliki peran dalam memberikan pemahaman terkait perpajakan kepada masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat meningkat (Ruky et al., 2018). Langkah tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain melalui edukasi perpajakan, penerapan sanksi juga menjadi salah satu instrumen yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Praktik penghindaran pajak dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindakan yang termasuk dalam praktik korupsi (Wildan, 2020). Dalam perspektif yang lebih luas, tindakan korupsi terhadap keuangan negara, baik yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Hal ini

disebabkan karena praktik penghindaran pajak berdampak pada berkurangnya penerimaan negara sehingga dana yang tersedia untuk pembangunan menjadi tidak optimal. di berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan pajak dapat berbentuk sanksi administratif maupun material, yang penerapannya disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggarannya.

1.2 Rumusan Masalah

Seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara, kontribusi pajak dalam APBN juga terus bertambah setiap tahun. Idealnya, kondisi ini diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak. Namun, penerimaan negara dari sektor jasa keuangan dan asuransi justru mengalami penurunan, bahkan hingga saat ini belum mampu mencapai kembali tingkat realisasi seperti sebelum penurunan tersebut (Santoso & Muid, 2022) .

Pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar jika dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Oleh karena itu, jika terjadi praktik penghindaran pajak, maka ini akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan negara (Santoso & Muid, 2022). Penelitian ini menggunakan variabel tanggung jawab sosial dan koneksi politik untuk menganalisis apakah faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap pendapatan negara serta realisasi penerimaan yang belum optimal, maka perlu dilakukan pengujian terhadap faktor faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Berdasarkan fenomena dan uraian yang telah dipaparkan, diperlukan perumusan pertanyaan penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan

penelitian. Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah tanggung jawab sosial memengaruhi penghindaran pajak?
2. Apakah koneksi politik memengaruhi hubungan antara tanggung jawab sosial dengan penghindaran pajak.

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap hubungan tanggung jawab sosial dengan penghindaran pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan sektor perbankan, investor, dan bagi penulis selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan sektor perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi berbagai pihak, sehingga kedepannya perilaku ketidakpatuhan terhadap perpajakan dapat diminimalkan serta mendorong perusahaan untuk menjadi lebih taat akan peraturan perpajakan yang ada.

2. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada investor mengenai pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan dan koneksi politik terhadap praktik penghindaran pajak. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengalokasikan dana investasi serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya yang membahas praktik penghindaran pajak serta faktor-faktor yang memengaruhinya pada perusahaan sektor perbankan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran mengenai susunan setiap bab dalam penelitian sehingga pembahasan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menjelaskan dan menjabarkan terkait gambaran umum penelitian. Pada bagian ini dijelaskan dan diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II akan dijelaskan dan diuraikan tentang landasan teori dan konsep saat menyusun penelitian. Pada bagian ini dijelaskan dan diuraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III dijelaskan dan diuraikan terkait bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan serta cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Pada bagian ini dijelaskan dan diuraikan tentang definisi operasional variabel, populasi, sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV diuraikan tentang hasil dan pembahasan yang mendeskripsikan terkait objek penelitian data, serta interpretasi dari hasil dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian, serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Pemangku Kepentingan

Teori pemangku kepentingan mulai dikenal dalam banyak literatur setelah diterbitkan buku *Strategic Management: A Stakeholder Approach* karya Freeman (1984). Freeman memperkenalkan teori stakeholder yang mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai pihak-pihak, baik individu maupun kelompok, yang dapat memengaruhi ataupun terdampak oleh pencapaian tujuan perusahaan

Teori pemangku kepentingan mengungkapkan bahwa hubungan perusahaan tidak hanya berkaitan dengan pemegang saham saja. Melainkan juga memiliki keterkaitan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam menjalankan kegiatan pada sebuah perusahaan. Pada pendekatan keberhasilan suatu perusahaan tidak semata-mata diukur dari aspek keuangan saja, juga dari dampak yang akan ditimbulkan dari hubungan dengan pihak tertentu. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, semua yang termasuk pemangku kepentingan mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan termasuk pemerintah yang ada didalamnya (Ramadhan, 2020). Para pemangku kepentingan yang dimaksud terdiri dari pemegang saham, karyawan, kreditor, pemasok, bank, pemerintah, pelanggan, komunitas, serta masyarakat.

Teori pemangku kepentingan menyoroti perlunya melayani semua pemangku kepentingan terlepas dari besarnya kepentingan hukum mereka dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan pemangku kepentingan lebih baik dari proses maupun hasilnya (Gilbert & Rasche, 2020)

Pemangku kepentingan terbagi menjadi dua, pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal meliputi karyawan, manajemen, pemilik perusahaan, dewan direksi, tim manajerial, serta pemegang saham. Sementara itu, pemangku kepentingan eksternal mencakup pemerintah dan masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas dan keputusan perusahaan. Teori pemangku kepentingan memberikan berbagai manfaat dalam pengelolaan perusahaan, salah satunya adalah terciptanya citra positif perusahaan. Berdasarkan teori ini, reputasi yang baik dapat diperoleh melalui pembentukan citra yang positif, yang tercermin dari interaksi antara pemangku kepentingan dengan masyarakat luas (Gilbert & Rasche, 2020).

Dalam konteks ini, pemangku kepentingan dapat berperan dalam membangun reputasi perusahaan, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan yang mengedepankan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan (Gilbert & Rasche, 2020). Kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat reputasi dan persepsi positif perusahaan di mata pemangku kepentingan lainnya maupun masyarakat luas. Hubungan antara pemangku kepentingan dan tanggung jawab sosial, mencerminkan bagaimana perusahaan memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Melalui tanggung jawab sosial, perusahaan berupaya memberikan manfaat kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, karyawan, pelanggan, serta lingkungan. Pelaksanaan kegiatan CSR dapat memberikan kontribusi positif bagi perusahaan diantaranya memperbaiki reputasi, loyalitas pelanggan, kepercayaan, serta daya tarik bagi mitra bisnis (Justin et al., 2025).

Pemerintah merupakan salah satu stakeholder yang memiliki tugas penting dalam menjaga stabilitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan lingkungan guna memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Apabila suatu perusahaan memiliki koneksi politik yang kuat, maka ketergantungan perusahaan terhadap dukungan pemerintah cenderung meningkat. Koneksi politik tersebut dapat dimanfaatkan untuk melindungi perusahaan dari risiko deteksi atas praktik perpajakan agresif (Kim & Zhang, 2021). Penyalahgunaan koneksi politik menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak dapat terjadi melalui keterkaitan antara pelaku bisnis dengan aparat pemerintah. Oleh karena itu, koneksi politik menjadi fokus penelitian yang menarik, mengingat berbagai kasus penghindaran pajak banyak terjadi pada perusahaan yang memiliki keterikatan kuat dengan pemerintah atau partai politik di Indonesia.

Teori pemangku kepentingan memiliki tiga pendekatan utama yang saling berkaitan, yaitu deskriptif, instrumental, dan normatif. Pendekatan deskriptif menjelaskan hubungan antara pemangku kepentingan di masa lalu,

masa kini, dan masa mendatang dengan hasil yang diharapkan. Pendekatan normatif menekankan pada prinsip moral dan filosofis dalam menganalisis aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan etika. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap keputusan yang diambil. Konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab sosial diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan (Ardina, 2023).

Berdasarkan teori pemangku kepentingan, keberhasilan perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan dari berbagai pihak, seperti karyawan, pemerintah, pelanggan, pemegang saham, dan lingkungan, baik dari aspek hukum, ekonomi, maupun etika (Rashid *et al.* 2022). Teori ini juga menekankan bahwa organisasi harus berupaya melindungi kepentingan seluruh melalui perilaku yang etis, karena hal tersebut akan berimplikasi pada keberlanjutan perusahaan masa mendatang. Dengan demikian, manajemen perusahaan yang efektif perlu meningkatkan kontribusi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial (Tang & Yang, 2020).

Keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang memerlukan pendekatan manajemen yang terbuka terhadap kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait. Oleh karena itu, manajemen perlu menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam membangun serta mempertahankan hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang transparan dan

berkualitas (Koh et al., 2023). Teori pemangku kepentingan juga dipandang sebagai pendekatan manajemen strategis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip etika perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik mampu memberikan dampak positif bagi pemegang saham, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait pengeluaran untuk tanggung jawab sosial dan kewajiban perpajakan (Rashid *et al.*, 2022). Konflik kepentingan dapat semakin meningkat ketika dewan direksi memiliki koneksi politik dan berupaya memaksimalkan keuntungan melalui pengendalian keputusan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan praktik penghindaran pajak (Rashid & Hossain, 2022).

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian yang dilakukan terkait tanggung jawab sosial perusahaan, penghindaran pajak, serta pengaruh koneksi politik dalam suatu perusahaan. Ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak masih menjadi fenomena umum yang terjadi di lingkungan perusahaan. Namun demikian, hasil dari berbagai penelitian sebelumnya tidak selalu menunjukkan kesimpulan yang konsisten, sehingga terdapat perbedaan temuan yang menimbulkan adanya *research gap*.

Rashid *et al.*, (2022) dalam penelitiannya berpendapat semakin besar pengeluaran perusahaan untuk kegiatan tanggung jawab sosial, maka tingkat penghindaran pajak cenderung semakin rendah. Sebaliknya, keberadaan koneksi politik sebagai variabel moderasi justru melemahkan pengaruh

tanggung jawab sosial terhadap praktik penghindaran pajak. Ini mengindikasikan bahwa keterhubungan dengan pihak politik dapat mendorong perusahaan menjadi kurang bertanggung jawab secara sosial. Ketika pihak yang memiliki keterkaitan politik memandang biaya tanggung jawab sosial sebagai beban yang dapat menurunkan kinerja perusahaan, maka pemangku kepentingan akan menilai bahwa perusahaan tersebut kurang menunjukkan tanggung jawab sosial. Selain itu, konsumen yang sangat peduli terhadap kondisi sosial cenderung memilih menggunakan produk perbankan dari perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara sosial, meskipun dengan biaya yang lebih tinggi, yaitu perusahaan yang lebih sedikit melakukan penghindaran pajak dan lebih banyak berinvestasi dalam kegiatan tanggung sosial.

Teori tersebut didukung oleh Warsono & Ardianto (2015) dalam penelitian yang berjudul *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak dengan insentif pajak sebagai variabel moderasi. Sejalan dengan penelitian sebelumnya tentang keterkaitan dengan tanggung jawab sosial, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa tanggung jawab sosial memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang semakin tinggi menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Hal ini khususnya terlihat pada perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah. CSR sendiri dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan dari

aktivitas ekonomi perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, adelfattah & Aboud (2020) memiliki pendapat lain terkait dengan tanggung jawab sosial dan praktik penghindaran pajak. Dalam penelitiannya tentang penghindaran pajak, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan pada kasus pasar modal mesir. Hasil penelitian ini adalah semakin tinggi kemungkinan perusahaan yang terlibat kegiatan penghindaran pajak, maka akan semakin tinggi kemungkinan perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Dalam penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen dan tata kelola perusahaan serta pengungkapan csr sebagai variabel independen.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku sebuah perusahaan belum selaras dengan tingkat pengeluaran tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Dengan kata lain, perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak cenderung lebih meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial untuk mengurangi potensi kekhawatiran publik. Abid & Dampak (2022) melakukan penelitian dengan judul '*Corporate Social Responsibility And Tax Avoidance: The Case Of French Companies*'. Dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi dan membuktikan kebenaran pendekatan estimasi penelitian diuji dengan menggunakan analisis multivariabel. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja tanggung jawab sosial, variabel independen yang digunakan adalah penghindaran

pajak, serta variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kualitas audit. Hasil dari penelitian ini digunakan guna mengetahui apakah kualitas audit memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, apabila dipraktikan oleh perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan dengan nilai tanggung jawab secara sosial yang tinggi adalah Perusahaan yang memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif. Dalam penelitian ini menyebutkan banyak perusahaan yang diaudit oleh auditor berkualitas tinggi cenderung terlibat dalam praktik tanggung jawab sosial untuk melindungi nilai terhadap konsekuensi agresif. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan tanggung jawab sosial sebagai kewajiban moral, namun lebih cenderung memaksimalkan hal tersebut untuk tujuan kekayaan dan melegitimasi operasi dalam sebuah perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab.

Pada sektor politik Kim & Zhang (2021) melakukan penelitian dengan judul '*Corporate political connections and tax aggressiveness*' dalam penelitian ini variabel dependennya adalah agresivitas pajak, variabel independennya adalah koneksi politik. Dari penelitian ini didapatkan bukti bahwa perusahaan yang terlibat secara politik lebih aktif dalam praktik *tax avoidance* karena meliputi beberapa karakteristik, termasuk risiko yang lebih rendah, pengetahuan yang lebih baik tentang perubahan peraturan perpajakan di masa mendatang, biaya politik yang lebih rendah dan kedekatan dengan pembuat kebijakan. Koneksi politik dinilai dapat membantu perusahaan

untuk mendapatkan akses terhadap anggota dewan. Akses ini yang nantinya akan menghubungkan perusahaan dengan informasi rahasia mengenai perubahan undang-undang dimasa yang akan datang atau sumber daya pemerintah yang akan dialokasikan untuk penegakan pajak.

Penelitian Kim & Zhang (2021) sejalan dengan penelitian Carney et al., (2022) menyebutkan ketika perusahaan yang memiliki hubungan secara politik dilihat lebih memiliki banyak keuntungan, keuntungan tersebut didapat dari hubungan politik yang terjalin. Namun hasil kedua penelitian tersebut hasilnya berbanding terbalik dengan penelitian Hijriani *et al.*, (2022) yang mengatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dengan proksi *GAAP Effective Tax Rate* (ETR). Perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak jarang akan dikenai sanksi atas hukuman dari pemerintah, hal ini dikarenakan perusahaan mencoba meminimalkan beban pajak dengan cara yang legal serta tidak melanggar peraturan perpajakan. Keinginan wajib pajak untuk membayar pajak dengan beban lebih rendah merupakan sifat alamiah manusia. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah ketika proses pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha agar terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Ringkasan terkait dengan penelitian terdahulu tentang penghindaran pajak, tanggung jawab sosial, dan koneksi politik dapat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Md. Harun Ur Rashid, Farhana Begum, Syed Zaid Hossain, Jamaliah Said (2022)	<i>Does CSR Affect Tax Avoidance? Moderating Role Of Political Connections in Bangladesh Banking Sector</i>	Variabel dependen: Penghindaran pajak. Variabel Independen: Tanggung Jawab sosial Variabel Moderasi: Koneksi Politik	Semakin tinggi pengeluaran tanggung jawab sosial perusahaan, maka akan semakin rendah penghindaran pajak. Sebaiknya efek moderasi dari koneksi politik melemahkan peran tanggung jawab sosial dalam penghindaran pajak yang menyiratkan bahwa hubungan politik membuat perusahaan tidak bertanggung jawab secara sosial. Koneksi politik yang kuat cenderung menjadi agresif terhadap pajak dengan melemahkan peran dari tanggung jawab sosial.
2.	Abdelfattahh & Abound A (2020)	<i>Tax Avoidance Corporate Governance, And Corporate Social Responsibility: The Case of The Egyptian</i>	Variabel dependen: penghindaran pajak. Variabel Independen: Tata kelola perusahaan, pengungkapan	Semakin tinggi tingkat penghindaran pajak, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial, perilaku sebuah perusahaan belum tentu selaras dengan tingkat

		<i>And Capital Market</i>	tanggung jawab sosial.	pengeluaran tanggung jawab sosial-nya.
3.	Souhir Abdi & Saida Dammak (2024)	<i>Corporate Social Responsibility And Tax Avoidance: The Case Of French Companies</i>	Variabel dependen: kinerja tanggung jawab sosial. Variabel independen: penghindaran pajak. Variabel moderasi: kualitas audit	Perusahaan dengan nilai tanggung jawab sosial yang tinggi adalah perusahaan yang lebih mungkin untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa lebih banyak perusahaan yang diaudit oleh auditor berkualitas tinggi cenderung terlibat dalam praktik tanggung jawab sosial untuk melindungi nilai perusahaan terhadap konsekuensi agresif.
4.	Warsono & Yuli Ardianto (2023)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Insentif Pajak sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia)	Variabel dependen: Agresivitas Pajak. Variabel Independen: Tanggung jawab sosial. Variabel Moderasi: Insentif Pajak	Tanggung jawab sosial memberikan pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak. Terutama pada perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah.

5.	Chansong (Fransis) Kim & Liandong Zhang (2021)	<i>Corporate Political Connections and tax aggressiveness</i>	Variabel dependen: agresivitas pajak. Variabel independen: Koneksi politik	Perusahaan yang terlibat secara politik lebih aktif dalam praktik penghindaran pajak karena memiliki beberapa karakteristik yang mempermudah dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Karakteristik tersebut meliputi: risiko ketahuan yang lebih rendah, pengetahuan yang lebih baik tentang perubahan peraturan perpajakan yang akan mendatang, biaya politik yang lebih rendah, serta memiliki kedekatan dengan pembuat kebijakan.
6.	Michael Carney, Saul Estrin, Zhi Xiang Liang, Daniel Shapira (2022)	National Institution system, foreign ownership and firm performance: the case of understudied	Variabel dependen: Produktivitas tenaga kerja persentase penjualan yang diekspor. Variabel independen: umur perusahaan, perusahaan GDP Perkapita, kepemilikan .	Perusahaan yang terhubung secara politik dilihat lebih memiliki banyak keuntungan, keuntungan tersebut didapat dari hubungan politik yang terjalin.

7.	Anisa Nadia Hijriani, Sri Wahjuni, Setu Setyawan (2022)	Pengaruh Koneksi Politik, Dewan Komisaris, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).	Variabel dependen: penghindaran pajak. Variabel independen: koneksi politik, jumlah rapat dewan komisaris, tingkat kehadiran anggota dewan komisaris dalam rapat, ROA, LEV, Ukuran Perusahaan	Variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Baik melalui GAAP ETR maupun Current ETR. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak akan dikenakan sanksi atas hukuman dari pemerintah karena perusahaan berusaha mengurangi beban pajak dengan cara legal dan tidak melanggar Undang Undang yang berlaku.
----	---	---	--	--

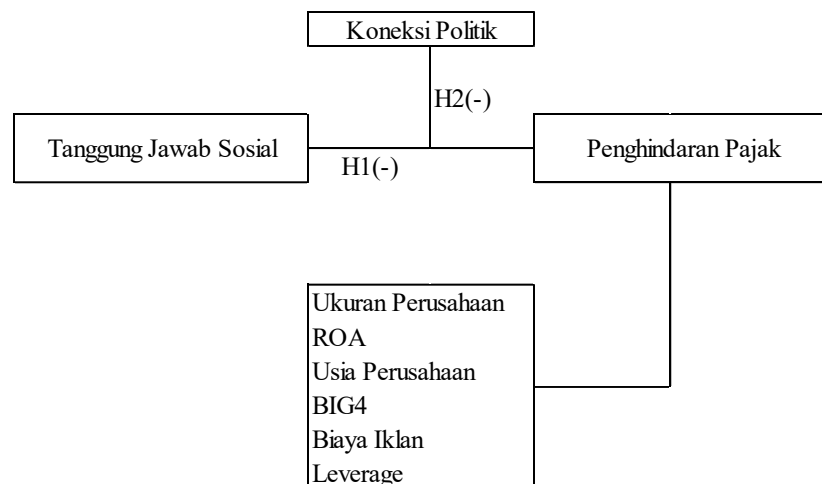
(Sumber : diolah dari berbagai referensi)

2.2 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen (Y) yaitu penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Book Tax Differences* (BTD), variabel independen (X) yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta variabel moderasi (Z) yaitu koneksi politik (Political Board Member/PBM). Selain itu penelitian ini menggunakan lima variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan (SIZE), *Leverage* (LEV), Profitabilitas (ROA), Usia perusahaan (AGE), dan kualitas audit (BIG 4).

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, CSR dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Selanjutnya, koneksi politik juga berperan sebagai variabel moderasi yang dapat mengubah kekuatan hubungan antara CSR dan penghindaran pajak. Agar diperoleh hasil yang lebih valid, penelitian ini juga memasukan variabel kontrol yang diperkirakan untuk memengaruhi praktik penghindaran pajak. Kerangka pemikiran disajikan pada gambar 2.1

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah disusun dengan kalimat tanya, sedangkan hipotesis dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan kerangka penelitian pada gambar 2.1, hipotesis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

2.3.1 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan wajib memenuhi tanggung jawabnya kepada seluruh pemangku kepentingan yang memiliki beragam kepentingan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemerintah adalah dengan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya pajak yang disetorkan kepada pemerintah dikelola dengan baik agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pajak tersebut (Rahmawati et al., 2025). Oleh karena itu, perusahaan akan membayar pajak apabila perusahaan menilai bahwa pajak yang telah mereka berikan dimanfaatkan oleh pemerintah tidak hanya untuk kelompok tertentu saja, tetapi dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun kondisi ini dapat berlaku sebaliknya apabila perusahaan merasa bahwa ketika melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah, pajak tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, seperti tidak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka perusahaan akan beranggapan bahwa baik melakukan penghindaran pajak dan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk membayar pajak dialihkan menjadi cadangan untuk tanggung jawab sosial perusahaan, dengan tujuan membangun citra positif perusahaan di mata masyarakat.

Banyak penelitian mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan memiliki kaitan dengan penghindaran pajak. Menurut Alasaadi (2020) perusahaan yang berkontribusi dengan menggunakan tanggung jawab sosial guna menutupi perilaku negatif perusahaan dan tidak bertanggung

jawab secara sosial dengan melakukan penghindaran pajak secara agresif. Hal ini berlaku sebaliknya, menurut Rasid *et.al.*, (2022) menegaskan apabila perusahaan dengan skor tanggung jawab sosial yang lebih tinggi dianggap melakukan lebih sedikit penghindaran pajak pada negara negara dengan tata kelola yang buruk.

Pernyataan tersebut didukung oleh teori pemangku kepentingan dimana dalam teori pemangku kepentingan citra baik para pemangku kepentingan dianggap sebagai gambaran dari sebuah perusahaan (Rashid *et al.*, 2022). Sehingga perusahaan berupaya untuk meningkatkan citra tersebut salah satu caranya dengan menggunakan praktik tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dianggap memberikan dampak kepada masyarakat secara luas. Berdasarkan uraian yang disebutkan maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat hubungan negatif antara tanggung jawab sosial dengan penghindaran pajak.

2.3.2 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Hubungan Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan dengan Penghindaran Pajak

Perusahaan yang terlibat aktif secara politik melakukan praktik penghindaran pajak karena terdapat beberapa hal yang mendukung untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal tersebut merupakan karakteristik yang terdiri dari risiko yang lebih rendah, kedekatan dengan pembuat kebijakan, biaya politik yang rendah serta pengetahuan yang lebih baik tentang peraturan dimasa yang akan mendatang. (Kim & Zhang, 2021).

Hubungan politik dianggap sebagai bahaya utama dibalik praktik penghindaran pajak (Adams & Ferreira, 2022). Dengan adanya hubungan tersebut dianggap dapat menjadi penyelamat apabila terjadi permasalahan di masa yang akan datang. Perusahaan yang memiliki ikatan politik diduga menggunakan tanggung jawab sosial sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan pemerintah dan mengambil keuntungan dari hubungan kedekatan dengan pemerintah. Sehingga hal ini merubah motivasi pelaksana tanggung jawab sosial dan normatif menjadi motivasi strategis. Direksi mencoba memaksimalkan keuntungan mereka dengan mengendalikan pengambilan keputusan dewan mengenai tanggung jawab sosial dan pembayaran pajak (Rashid & Hosain, 2022).

Bisnis yang memiliki koneksi politik mungkin menggunakan pengaruh dan posisinya untuk mendapatkan penerimaan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki ikatan politik kemungkinan tidak hanya memandang tanggung jawab sebagai peningkatan legitimasi, melainkan memiliki peluang yang memungkinkan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Rashid *et al.*, 2022). Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: koneksi politik melemahkan dampak negatif tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan Delapan variabel yang terdiri atas variabel dependen, variabel independen, variabel moderasi, serta variabel kontrol. Variabel dependen yang digunakan yakni penghindaran pajak. Variabel independen yang digunakan adalah tanggung jawab sosial. Variabel moderasi yang digunakan adalah koneksi politik. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran perusahaan, leverage ROA, usia perusahaan, dan BIG 4.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen dan menjadi fokus utama dalam pengujian hubungan antarvariabel dalam suatu penelitian (Creswell & Creswell, 2023). Dalam penelitian ini, penghindaran pajak (*tax avoidance*) digunakan sebagai variabel dependen yang menjadi fokus penelitian. Penghindaran pajak merupakan tindakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan yang masih berada dalam batas ketentuan hukum. Praktik ini sulit diukur secara langsung karena tidak dapat diamati secara eksplisit dalam aktivitas perusahaan, sehingga pengukurannya umumnya menggunakan proksi yang berasal dari informasi laporan keuangan (Hanlon et al., 2024).

Dalam penelitian ini, penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan metode *book-tax difference* (BTD). *Box-tax difference* merupakan perbedaan yang terjadi antara laba kena pajak berdasarkan ketentuan perpajakan dengan laba menurut standar akuntansi. *Book-tax difference* berdasarkan Rashid *et.,al* (2022) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BTD} = \frac{(\text{NIBT} - \text{Taxable Income})}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan:

- BTD : *Book-tax difference*
- NIBT : Penghasilan bersih sebelum pajak
- Taxable Income* : Beban pajak Kiri / Tarif pajak
- Total Asset : Total Aset tertinggal Selama Setahun

3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang dapat memengaruhi variabel lain, baik memberikan pengaruh positif maupun pengaruh negatif (Creswell & Creswell, 2023). Penelitian ini menggunakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) sebagai variabel independen. Pengukuran CSR dilakukan menggunakan Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRDI) berdasarkan tingkat pengungkapan item CSR dalam *annual report* atau *sustainability report* perusahaan dengan mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021. Tanggung jawab sosial dipilih sebagai variabel independen

karena mencerminkan komitmen perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, implementasi CSR juga berkaitan dengan perilaku etis perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan perpajakan. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang lebih tinggi cenderung menghindari praktik perpajakan yang agresif karena berupaya menjaga legitimasi, reputasi, dan kepercayaan para pemangku kepentingan (Ozbay et al., 2023). Berdasarkan Rashid et al. (2022), rasio tanggung jawab sosial dapat diukur menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$CSRDI = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan:

$CSRDI_j$ = indeks pengungkapan CSR perusahaan j

$\sum X_{ij}$ = jumlah item CSR yang diungkapkan

N_j = total item CSR yang digunakan dalam penelitian

3.3.1 Variabel Moderasi

Variabel moderasi atau variabel moderator merupakan variabel yang menghubungkan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel moderasi dapat memberikan pengaruh, baik dalam memperkuat maupun memperlemah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen (Hayes, 2022). Penelitian ini menggunakan koneksi politik

sebagai variabel moderasi. Koneksi politik dianggap sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini, variabel moderasi diukur dengan mempertimbangkan jumlah dewan komisaris atau kerabat dewan komisaris yang memiliki jabatan pada lembaga pemerintahan (Rashid et.al., 2022).

3.4.1 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang berperan untuk mengendalikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel kontrol adalah variabel yang diatur atau dibuat tetap, Hal ini dilakukan agar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dianalisis secara lebih tepat dengan meminimalkan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak menjadi bagian dari penelitian (Hayes, 2022). Ukuran perusahaan, leverage, ROA, umur perusahaan, kualitas audit, ditetapkan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini.

1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (size) dimanfaatkan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini karena dipandang dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak pada Kondisi tersebut terjadi karena perusahaan berskala besar memiliki kapasitas yang lebih memadai untuk menyusun strategi perpajakan, sehingga kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak juga lebih tinggi. Menurut Rashid *et al.*, (2022), ukuran perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

SIZE Logaritma natural dari total asset
--

2. Leverage

Leverage dipilih sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini karena mencerminkan tingkat penggunaan utang perusahaan dalam membiayai aktivitas operasional maupun investasinya. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung menghadapi beban bunga dan tekanan keuangan yang lebih besar, sehingga memiliki insentif untuk melakukan perencanaan pajak guna meminimalkan beban pajak dan menjaga arus kas perusahaan. Oleh karena itu, leverage berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak dan perlu dikendalikan dalam penelitian agar hubungan antara variabel utama dapat dianalisis secara lebih akurat (Richardson et al., 2023). Selain itu, karena pembayaran bunga dapat menjadi pengurang pajak, leverage memiliki keterkaitan dengan praktik penghindaran pajak perusahaan. Menurut Rashid *et al.*, (2022), leverage dapat dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}}$
--

3. ROA

Return On Assets (ROA) dipilih sebagai variabel kontrol karena tingkat profitabilitas perusahaan dapat dilihat dari nilai ROA. Semakin tinggi

ROA, maka perusahaan akan menanggung beban pajak yang semakin besar, sehingga mendorong perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam menyusun strategi perpajakan guna menekan tarif pajak efektif. Menurut Rashid *et al.*, (2022), *Return On Assets* (ROA) dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$\text{ROA} = \frac{\text{Pendapatan Bersih Perusahaan}}{\text{Total Asset}}$

4. Usia Perusahaan

Usia perusahaan dimanfaatkan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini,. Usia perusahaan dapat dihitung sejak perusahaan berdiri hingga tahun dilakukannya penelitian. Usia perusahaan dipilih sebagai variabel kontrol karena mencerminkan bahwa perusahaan yang telah lama beroperasi cenderung mengalami penurunan tingkat efisiensi seiring berjalannya waktu. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghematan terhadap biaya yang ditanggung, termasuk efisiensi beban pajak. Menurut Rashid *et al.*, (2022), usia perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\text{Usia Perusahaan} = \text{Log Usia Perusahaan}$

5. Kualitas Audit

Kualitas audit diukur dengan memberikan skor 1 apabila perusahaan menggunakan jasa firma audit BIG 4 dalam penyusunan laporan tahunan, dan skor 0 apabila tidak (Rashid *et al.*, 2022). Kualitas audit digunakan sebagai variabel kontrol karena berperan dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Semakin baik kualitas audit, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan tindakan yang dapat menurunkan kualitas pelaporan keuangan, termasuk praktik penghindaran pajak. Daftar firma audit BIG 4 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Firma Audit BIG 4

No.	Nama Perusahaan
1	PricewaterhouseCoopers (PwC)
2	Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte)
3	Ernst & Young (E&Y)
4	Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono, (2023), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022-2024. Sektor perbankan dipilih sebagai populasi penelitian ini karena bank dipandang sebagai komponen vital dalam

perekonomian. Perbankan dianggap memiliki peran yang krusial di Indonesia dalam mengatasi permasalahan keuangan, karena produk dan layanan perbankan dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, sektor perbankan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian karena termasuk sebagai salah satu penggerak Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pemilihan periode penelitian yaitu tahun 2022 hingga 2024 didasarkan pada kondisi di mana pada periode tersebut penerimaan pajak dari sektor jasa keuangan dan asuransi mengalami penurunan, sementara realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan secara keseluruhan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun belum mampu melampaui target APBN.

Pada periode penelitian terdapat 48 perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini menggunakan perusahaan sektor perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 hingga 2024 yang telah memenuhi kriteria penentuan sampel. Kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2022-2024.
2. Menyajikan laporan keuangan dalam satuan rupiah selama periode penelitian dan tidak terdapat laba negatif (mengalami kerugian)
3. Menyajikan data yang dibutuhkan dalam penelitian secara lengkap selama periode penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut KBBI, data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber utamanya, melainkan melalui pihak lain, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan dan laporan keuangan masing masing perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022-2024. Laporan keuangan dan laporan tahunan tersebut dapat diperoleh melalui situs resmi masing- masing perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini memakai dua cara yakni studi pustaka dan penelitian lapangan.

1. Studi Pustaka

Penelitian ini dalam mengumpulkan data dan teori yang digunakan untuk menunjang penelitian menggunakan studi pustaka terhadap artikel, jurnal, buku, dan berbagai sumber lain yang memiliki kaitan dengan penelitian.

2. Penelitian lapangan

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data sekunder, dimana data yang digunakan seperti laporan keuangan perusahaan pada tahun 2022-2024. Data tersebut dapat diakses dan

diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *website* resmi tiap-tiap perusahaan.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis data dalam metode kualitatif adalah dengan menggunakan statistik. Penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk menguji pengaruh hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS versi 2025 dalam melakukan analisis.

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2021) statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian. Informasi tersebut disajikan melalui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, *variance*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness*.

3.5.2 Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi dasar, sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat dipercaya. Dengan artian tidak terjadi penyimpangan penyimpangan yang cukup serius dari asumsi yang harus dipenuhi. Uji asumsi klasik dilakukan untuk menilai tolak ukur yang digunakan valid dan tidak bias (Lumbanraja, 2023). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi normalitas, uji Multikolineritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2021). Model regresi yang baik adalah yang memiliki data yang berdistribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Pada dasarnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Dalam persamaan regresi linear berganda apabila nilai koefisien korelasi antar variabel independen sangat tinggi hal ini berarti model suatu regresi kurang baik untuk digunakan sebagai penelitian (Ghozali, 2021).

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (periode sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat permasalahan autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. (ghozali, 2021). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas autokorelasi. Pada penelitian ini cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji run test. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terbentuk secara random atau tidak (ghozali, 2021).

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk membuktikan apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas (Ghozali, 2021). Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID dan uji glejser. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu y adalah yang telah diprediksi sementara sumbu x adalah residual yang telah di studentized (Ghozali, 2021). Dasar analisis menggunakan metode ini adalah sebagai berikut:

1. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik titik tampak membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang) maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pada Uji Glejser, Pada uji Glejser, keberadaan gejala heteroskedastisitas dapat diketahui melalui nilai signifikansi koefisien regresi dari masing-masing variabel independen. Apabila koefisien regresi (beta) menunjukkan nilai yang signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi mengalami heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika koefisien regresi tidak signifikan secara statistik, maka model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

3.5.3 Analisis Regresi Moderasi

Analisis regresi moderasi atau *moderated regression analysis* menggunakan pendekatan analisis untuk mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh moderasi koneksi politik tentang hubungan antara CSR dengan penghindaran pajak. Regresi panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1.X_2 + \beta_4 X_3 + \beta_5 X_4 + \beta_6 X_5 + \beta_7 X_6 + \beta_8 X_7 + e$$

Keterangan:

Y = penghindaran Pajak

α = Konstanta

e	= eror
β_1	= Koefisien regresi variabel tanggung jawab sosial
β_2	= koefisien regresi variabel koneksi politik
β_3	= koefisien regresi variabel moderasi
β_4	= koefisien regresi variabel ukuran perusahaan
β_5	= Koefisien regresi variabel ROA
β_6	= koefisien regresi usia perusahaan
β_7	= koefisien regresi variabel BIG 4
β_8	= koefisien regresi variabel leverage
X1	= tanggung jawab sosial
X2	= koneksi politik
X3	= ukuran perusahaan
X4	= ROA
X5	= Usia Perusahaan
X6	= BIG 4
X8	= leverage

3.5.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan besaran dampak atas aktualitas dari sifat dan ciri populasi sesuai sampel penelitian. (Lumbanraja, 2023).

3.5.4.1 Uji Statistik F (Uji Stimulan)

Pengujian statistik F digunakan untuk mengetahui ketepatan regresi pada sampel dengan tujuan untuk melihat apakah model tersebut secara keseluruhan layak uji atau tidak. (Ghozali, 2021), dalam uji F justifikasinya sederhana, yaitu :

1. $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $Siginifakansi < 0,05$ (5%) maka dinyatakan bahwa model tersebut layak dan bisa terus dilanjutkan.
2. $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Siginifakansi > 0,05$ (5%) maka dinyatakan tidak fit dan harus dimodifikasi terlebih dahulu.

3.5.4.2 Uji Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) dipakai Ketika ingin melihat kemampuan sebuah model dalam menjelaskan berbagai variabel dependen. Nilai tersebut biasanya terdiri atas 0-1. Jika nilai R^2 semakin dekat dengan angka 1 maka semakin besar pula variabilitas variabel independent (Ghozali, 2021).

3.5.4.3 Uji Statistik T (Uji Parsial)

Uji statistik t diimplementasikan untuk mengevaluasi dan mendeteksi tingkat signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2021) Dalam kerangka penelitian ini, pengujian parsial ditujukan untuk menganalisis kontribusi dari variabel ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, serta

kualitas audit dalam menstimulasi perubahan pada tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*). dalam uji F justifikasinya, yaitu

1. $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau $Siginifakansi < 0,05$ (5%) maka dinyatakan berpengaruh signifikan.
2. $T_{hitung} < T_{tabel}$ atau $Siginifakansi > 0,05$ (5%) maka dinyatakan tidak berpengaruh signifikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini merupakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 sampai 2024. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pemilihan sampel yang disengaja oleh peneliti. Pada teknik ini pengambilan sampel didasarkan atas pertimbangan. Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahapan pemilihan sampel berdasarkan kriteria disajikan dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga tahun berturut turut pada tahun 2022-2024	48
2.	Menyajikan laporan keuangan menggunakan satuan rupiah selama metode penelitian dan tidak terdapat laba negatif (mengalami kerugian)	(9)
3.	Menyajikan data yang dibutuhkan selama periode penelitian secara lengkap	(1)
Jumlah sampel penelitian terpilih		38
Jumlah sampel total dalam periode penelitian (3 tahun)		114
Data outlier		(21)
Total Sampel		93

Sumber= data sekunder diolah

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa sampel dalam penelitian ini terdiri dari 93 perusahaan yang berasal dari sektor perbankan. Periode penelitian selama tiga tahun yakni pada 2022 hingga 2024. Total sampel awal yang akan digunakan sebanyak 144 sampel, namun dikarenakan adanya data *outlier* pada sampel penelitian, maka data yang diolah berjumlah 93 datan. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 hingga 2024 sebagai objek penelitian.

4.2 Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi moderasi (*moderated regression analysis*). Tujuannya untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel dependen (Penghindaran Pajak), variabel independen (Tanggung Jawab Sosial), variabel moderasi (Koneksi Politik).

4.2.1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan atau dapat mendeskripsikan suatu data terkait dengan penelitian dengan cara melihat nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2021). Variabel dalam penelitian ini diuji menggunakan software SPSS. Hasil uji analisis statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BTD	93	-0.0028	0.0046	0.000167	0.0013617
CSR	93	0.3419	0.9573	0.537912	0.1397639
PBM	93	0.0000	0.4615	0.109132	0.1334150
CSRPBM	93	-0.0152	0.0785	0.009590	0.0192430
SIZE	93	12.5203	16.1188	13.907977	0.7830246
LEV	93	0.0749	0.9181	0.701580	0.2213330
ROA	93	0.0002	0.0841	0.013778	0.0125368
AGE	93	24	129	55.80	24.466
BIG4	93	0	1	0.54	0.501
Valid N (listwise)	93				

Sumber : Diolah dengan SPSS 25

Pada tabel 4.2 dengan jumlah data penelitian (N) adalah 93, Uji Analisis Statistik Deskriptif menyajikan data nilai Minimum, Nilai Maksimum, Mean, serta Standar Deviasi pada masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

1. Uji statistik deskriptif terhadap penghindaran pajak (BTD) mempunyai nilai minimum sebesar -0.0028 yang ditunjukan oleh perusahaan BRIS. Mempunyai nilai maksimum 0.0046 yang ditunjukan oleh Perusahaan BBNI. Mempunya nilai Mean sebesar 0.000167. diketahui nilai standar deviasinya tinggi daripada mean yakni 0.0013617. Nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan nilai mean menunjukkan bahwa data BTD memiliki tingkat variasi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan tingkat *Book Tax Differences* antarperusahaan dalam

sampel penelitian.yang berarti bahwa rata- rata perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

2. Uji statistik terhadap variabel tanggung jawab sosial (CSR) mempunyai nilai minimum sebesar 0.3419 yang ditunjukan oleh perusahaan BBSI. Mempunyai nilai maksimum sebesar 0.9573 yang ditunjukan oleh Perusahaan BNIL. Mempunyai nilai mean sebesar 0.537912 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,1397639. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan nilai mean menunjukkan bahwa sebaran data CSR relatif homogen atau tidak terlalu bervariasi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan sektor perbankan cenderung merata dan tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar antarperusahaan dalam sampel penelitian.
3. Uji statistik deskriptif terhadap variabel koneksi politik (PBM) memiliki nilai minimum sebesar 0,0000 yang menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang tidak memiliki anggota dewan yang memiliki koneksi politik. Nilai maksimum sebesar 0,4615 ditunjukkan oleh perusahaan BMRI. Variabel PBM memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,109132 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,1334150. Nilai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa data koneksi politik memiliki tingkat penyebaran yang cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat koneksi politik pada perusahaan sektor perbankan dalam sampel penelitian bervariasi, di mana terdapat perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik sama sekali, sementara

perusahaan lain memiliki tingkat koneksi politik yang relatif lebih tinggi.

4. Uji statistik deskriptif terhadap variabel kontrol terdiri atas ukuran perusahaan (SIZE), leverage (LEV), profitabilitas (ROA), usia perusahaan (AGE), dan kualitas audit (BIG 4). Variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai minimum sebesar 12,5203 dan nilai maksimum sebesar 16,1188. Nilai rata-rata (mean) sebesar 13,907977 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,7830246. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai mean menunjukkan bahwa data ukuran perusahaan memiliki tingkat penyebaran yang relatif rendah, sehingga ukuran perusahaan dalam sampel penelitian cenderung homogen. Variabel leverage (LEV) memiliki nilai minimum sebesar 0,0749 dan nilai maksimum sebesar 0,9181. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,701580 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,2213330. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai mean menunjukkan bahwa data leverage memiliki tingkat penyebaran yang relatif rendah, sehingga tingkat leverage perusahaan dalam sampel penelitian cenderung tidak memiliki variasi yang terlalu besar. Variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 0,0002 dan nilai maksimum sebesar 0,0841. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,013778 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,0125368. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai mean menunjukkan bahwa data profitabilitas memiliki tingkat penyebaran yang relatif rendah, sehingga

tingkat profitabilitas perusahaan dalam sampel penelitian cenderung homogen. Variabel usia perusahaan (AGE) memiliki nilai minimum sebesar 24 tahun dan nilai maksimum sebesar 129 tahun. Nilai rata-rata (mean) sebesar 55,80 tahun dengan nilai standar deviasi sebesar 24,466. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai mean menunjukkan bahwa data usia perusahaan memiliki tingkat penyebaran yang relatif rendah, sehingga usia perusahaan dalam sampel penelitian tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu besar. Variabel kualitas audit (BIG 4) memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1. Nilai rata-rata (mean) sebesar 0,54 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,501. Nilai mean yang lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi menunjukkan bahwa data kualitas audit memiliki tingkat penyebaran yang relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four dan non-Big Four dalam sampel penelitian relatif seimbang.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan agar mengetahui apakah model estimasi telah mencapai kriteria. Uji asumsi klasik juga dilakukan untuk menilai parameter yang digunakan valid dan tidak bias. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas.

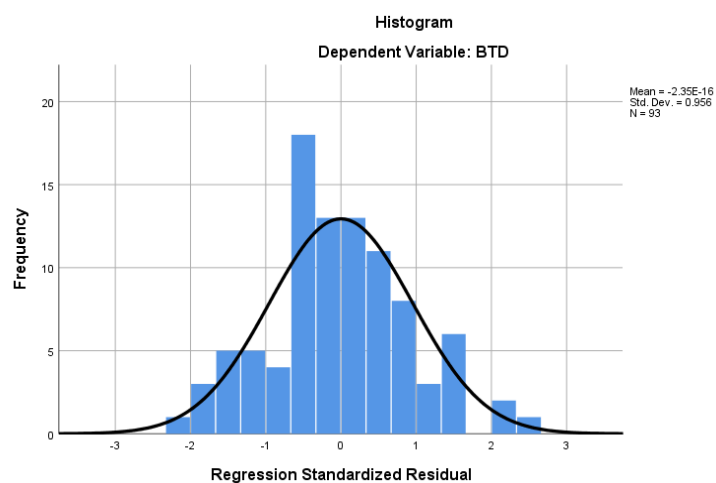
4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal (Ghozali, 2021). Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan melihat grafik histogram, grafik Normal P-P Plot *standardized residual* dan uji non-parametrik *Kolmogorov Smirnov* (K-S).

1. Analisis Grafik Histogram

Cara untuk melihat normalitas residual yakni dengan melihat grafik histogram lalu membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal (Ghozali, 2021). Grafik histogram dalam penelitian ini ditunjukkan dengan gambar 4.1 berikut:

Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Histogram



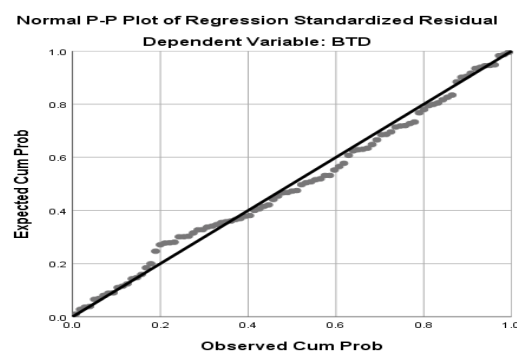
Sumber : diolah dengan SPSS, 2025

Berdasarkan Gambar 4.1, grafik histogram menunjukkan bentuk menyerupai lonceng dan tidak terlihat adanya kemencengan ke arah kanan maupun kiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

2. Grafik Normal P-P Plot *standardized residual*

Analisis menggunakan metode *Normal Probability Plot* (P-P Plot) merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2021). Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus normal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Grafik Normal P-P Plot pada penelitian ini ditunjukkan oleh gambar 4.2 berikut:

Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Normal P-P Plot



Sumber : data diolah dengan SPSS, 2025

Berdasarkan gambar 4.2 memperlihatkan bahwa persebaran data (dapat dilihat dari titik) menyebar pada sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal atau dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3. Uji Non-Parametrik *Kolmogorov Smirnov* (K-S).

Uji normalitas dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran visual. Uji normalitas menggunakan grafik dapat dilakukan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Hasil uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.00110066
Most Extreme Differences	Absolute	0.068
	Positive	0.058
	Negative	-0.068
Test Statistic		0.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : data diolah dengan SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,20 > 0,05$ ($\text{Sig} > \alpha$). Hal ini menunjukkan bahwa data residual distribusi normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2021). Syarat yang harus dipenuhi adalah nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 .

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	CSR	0.580	1.725
	PBM	0.308	3.243
	CSRPBM	0.604	1.657
	SIZE	0.260	3.849
	LEV	0.471	2.122
	ROA	0.620	1.614
	AGE	0.656	1.525
	BIG4	0.726	1.376
a. Dependent Variable: BTD			

Sumber : data diolah dengan SPSS, 2025

Berdasarkan hasil output pada tabel Coefficients, variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,580 dan VIF sebesar 1,725. Selanjutnya, variabel *Price to*

Book Market (PBM) menunjukkan nilai Tolerance sebesar 0,308 dan VIF sebesar 3,243. Variabel interaksi antara CSR dan Koneksi Politik (CSR-PBM) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,604 dan VIF sebesar 1,657. Variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,260 dan VIF sebesar 3,849. Selanjutnya, variabel *Leverage* (LEV) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,471 dan VIF sebesar 2,122. Variabel *Return on Assets* (ROA) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,620 dan VIF sebesar 1,614. Variabel *Age* memiliki nilai Tolerance sebesar 0,656 dan VIF sebesar 1,525. Terakhir, variabel Kualitas Audit (BIG4) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,726 dan VIF sebesar 1,376. Karena seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (Ghozali, 2021). Jika terdapat korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dengan

menggunakan metode *Run Test* dapat dilihat *Run Test* pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi Menggunakan Metode Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-0.00008
Cases < Test Value	46
Cases >= Test Value	47
Total Cases	93
Number of Runs	51
Z	0.731
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.465
a. Median	

Sumber data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.5, nilai *test* sebesar -0,00008 dan nilai probabilitas sebesar 0,465. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa residual bersifat acak sehingga tidak terdapat autokorelasi antar nilai residual.

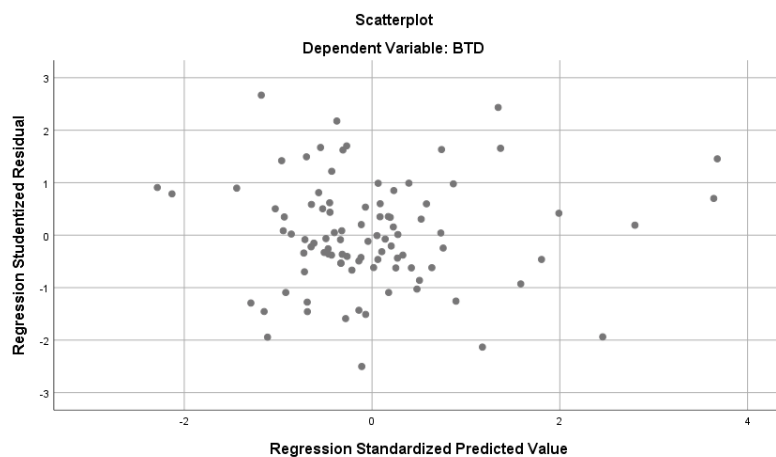
4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya pada model regresi (Ghozali, 2021). Model regresi yang baik yaitu model yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut homoskedastisitas.

1. Analisis dengan Grafik Plot

Untuk mengetahui apakah terjadi heteroskedastisitas, dapat dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan cara melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Hasil analisis dengan menggunakan grafik plot dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut.

Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Grafik Plot



Sumber diolah dengan SPSS, 2025

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa plot menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu *Regression Studentized Residual*. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini telah memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak digunakan dalam analisis regresi.

2. Analisis dengan Uji Glajser

Uji Glejser bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada setiap pengamatan. Pengujian dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Model regresi dinyatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas apabila masing-masing variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka model regresi menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser disajikan pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Glejser

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.001	0.002		-0.365	0.716
	CSR	0.002	0.001	0.403	3.189	0.062
	PBM	0.000	0.001	-0.057	-0.329	0.743
	CSRPBM	-0.004	0.004	-0.102	-0.821	0.414
	SIZE	0.000	0.000	0.140	0.741	0.460
	LEV	-0.001	0.000	-0.345	-2.461	0.086
	ROA	0.009	0.007	0.156	1.278	0.205
	AGE	-	0.000	-0.209	-1.759	0.082
	BIG4	5.901E-06	0.000	-0.208	-1.844	0.069
a. Dependent Variable: ABRESID						

Sumber diolah dengan SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji Glejser pada Tabel 4.6, diketahui bahwa seluruh variabel independen, yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Price to Book Market* (PBM), variabel interaksi CSR×Koneksi Politik (CSRPBM), Ukuran Perusahaan (SIZE), Leverage (LEV), *Return on Assets* (ROA), *Age*, dan Kualitas Audit (BIG4) memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.2.3 Hasil Uji Analisis Moderasi

Analisis regresi moderasi atau *moderate regression analysis* dilakukan untuk menguji antara pengaruh moderasi koneksi politik terhadap hubungan antara tanggung jawab sosial dengan penghindaran pajak. Hasil dari uji regresi moderasi dapat dilihat pada tabel 4.7

Tabel 4. 7 Koefisin Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.001	0.004		-0.311	0.756
	CSR	-0.003	-0.001	-0.287	-2.473	0.015
	PBM	0.001	0.002	0.071	0.449	0.655
	CSRPBM	0.020	0.008	0.285	2.508	0.014
	SIZE	0.000	0.000	-0.116	-0.672	0.503
	LEV	0.003	0.001	0.503	3.916	0.000
	ROA	0.032	0.012	0.296	2.645	0.010
	AGE	-3.261E-06	0.000	-0.059	-0.538	0.592
	BIG4	0.000	0.000	-0.052	-0.504	0.615
a. Dependent Variable: BTD						

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 4.7, variabel tanggung jawab sosial (CSR) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,015 ($<0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel tanggung jawab sosial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Book Tax Differences* (BTD). Koefisien regresi CSR sebesar -0,003 menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial berpengaruh negatif terhadap BTD. Artinya, semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka nilai BTD cenderung semakin rendah.

Variabel koneksi politik (PBM) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,655 ($>0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak

Variabel interaksi antara tanggung jawab sosial dan koneksi politik (CSRPM) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,014 ($<0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa variabel CSRPM berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Koefisien regresi interaksi sebesar 0,020 mengindikasikan bahwa koneksi politik memoderasi hubungan antara tanggung jawab sosial dan penghindaran pajak dengan memperlemah pengaruh negatif tanggung jawab sosial terhadap BTD.

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji Statistik F (Uji Stimulan)

Uji F simultan bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen, yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan, secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak. Model regresi dinyatakan layak dan fit apabila nilai signifikansi (Sig.) yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$).

Tabel 4. 8 Tabel Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.000	8	0.000	5.571	.000 ^b
	Residual	0.000	84	0.000		
	Total	0.000	92			
a. Dependent Variable: BTD						
b. Predictors: (Constant), BIG4, LEV, CSRPM, AGE, ROA, CSR, PBM, SIZE						

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh nilai F-hitung sebesar 5,571 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$), maka model regresi dinyatakan signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Price to Book Market* (PBM), variabel interaksi CSR×Koneksi Politik (CSRPBM), Ukuran Perusahaan (SIZE), Leverage (LEV), *Return on Assets* (ROA), *Age*, dan Kualitas Audit (BIG4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Book Tax Difference* (BTD) sebagai proksi penghindaran pajak. Oleh karena itu, model *Moderated Regression Analysis* (MRA) layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

4.2.4.2 Uji Determinasi

Dalam penelitian ini, nilai statistik yang digunakan sebagai acuan adalah Adjusted R Square guna menghindari bias akibat adanya penambahan jumlah variabel independent.

Tabel 4. 9 Model Summary Regresi Moderasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.589 ^a	0.347	0.284	0.0011519
a. Predictors: (Constant), BIG4, LEV, CSRPBM, AGE, ROA, CSR, PBM, SIZE				
b. Dependent Variable: BTD				

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 4.9, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,284. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 28,4% variasi penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Book Tax Differences* (BTD) dapat dijelaskan oleh variabel tanggung jawab sosial (CSR), koneksi politik (PBM), interaksi antara CSR dan PBM (CSRPBM), serta variabel kontrol yang terdiri atas ukuran perusahaan (SIZE), leverage (LEV), profitabilitas (ROA), usia perusahaan (AGE), dan kualitas audit (BIG 4). Adapun sebesar 71,6% variasi penghindaran pajak dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2.4.3 Uji Statistik T (Uji Parsial)

Uji T digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variasi variabel dependen, dengan menggunakan taraf kesalahan sebesar 0,05 (Ghozali, 2021).

Tabel 4. 10 Hasil Uji Statistik T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.001	0.004		-0.311	0.756
	CSR	-0.003	-0.001	-0.287	-2.473	0.015
	PBM	0.001	0.002	0.071	0.449	0.655
	CSRPBM	0.020	0.008	0.285	2.508	0.014
	SIZE	0.000	0.000	-0.116	-0.672	0.503
	LEV	0.003	0.001	0.503	3.916	0.000
	ROA	0.032	0.012	0.296	2.645	0.010
	AGE	-3.261E-06	0.000	-0.059	-0.538	0.592
	BIG4	0.000	0.000	-0.052	-0.504	0.615
a. Dependent Variable: BTB						

Sumber: Data diolah dengan SPSS, 2025

Berdasarkan informasi dari output SPSS yang terdapat pada Tabel 4.10, variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki koefisien regresi sebesar -0,003 dengan nilai t-hitung sebesar -2,473. Nilai tersebut lebih besar dari t-tabel sebesar 1,989 (berdasarkan nilai absolut, yaitu $-2,473 > 1,989$). Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,015 lebih kecil dari 0,05, sehingga *Corporate Social Responsibility* (CSR) dinyatakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Book Tax Difference* (BTD) sebagai proksi penghindaran pajak.

Selanjutnya, untuk variabel *Political Board Membership* (PBM) diperoleh koefisien regresi sebesar 0,001 dengan nilai t-

hitung sebesar 0,449, yang lebih kecil dibandingkan t-tabel sebesar 1,989. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,655, lebih besar dari 0,05, sehingga *Political Board Membership* (PBM) dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Book Tax Difference* (BTD).

Kemudian, variabel interaksi *Corporate Social Responsibility* dan *Political Board Membership* (CSR-PBM) memiliki koefisien regresi sebesar 0,020 dengan nilai t-hitung sebesar 2,508, yang lebih besar dibandingkan t-tabel sebesar 1,989. Nilai signifikansi sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel interaksi CSR-PBM berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Book Tax Difference* (BTD). Hasil ini menunjukkan bahwa *Political Board Membership* mampu memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) memiliki koefisien regresi sebesar 0,000 dengan nilai t-hitung sebesar -0,672, yang lebih kecil dibandingkan t-tabel sebesar 1,989. Nilai signifikansi sebesar 0,503 lebih besar dari 0,05, sehingga Ukuran Perusahaan (SIZE) dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Book Tax Difference* (BTD).

Untuk variabel Leverage (LEV) diperoleh koefisien regresi sebesar 0,003 dengan nilai t-hitung sebesar 3,916, yang lebih besar dibandingkan t-tabel sebesar 1,989. Nilai signifikansi sebesar 0,000

lebih kecil dari 0,05, sehingga Leverage (LEV) dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Book Tax Difference* (BTD).

Selanjutnya, variabel *Return on Assets* (ROA) memiliki koefisien regresi sebesar 0,032 dengan nilai t-hitung sebesar 2,645, yang lebih besar dibandingkan t-tabel sebesar 1,989. Nilai signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05, sehingga *Return on Assets* (ROA) dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Book Tax Difference* (BTD).

Kemudian, variabel Age memiliki koefisien regresi sebesar -3,261E-06 dengan nilai t-hitung sebesar -0,538, yang lebih kecil dibandingkan t-tabel sebesar 1,989. Nilai signifikansi sebesar 0,592 lebih besar dari 0,05, sehingga Age dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Book Tax Difference* (BTD).

Terakhir, variabel Kualitas Audit (BIG4) memiliki koefisien regresi sebesar 0,000 dengan nilai t-hitung sebesar -0,504, yang lebih kecil dibandingkan t-tabel sebesar 1,989. Nilai signifikansi sebesar 0,615 lebih besar dari 0,05, sehingga Kualitas Audit (BIG4) dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Book Tax Difference* (BTD).

4.3 Interpretasi Hasil

4.3.1 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Penghindaran Pajak

Pada tabel 4.10 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak karena memiliki nilai signifikansi $0.015 < 0,05$. Pernyataan tersebut mendukung H1 yang menyatakan semakin tinggi kontribusi tanggung jawab sosial maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan Rashid et al. (2022) dan Warsono & Yuli (2023) yang menyatakan bahwa CSR memberikan pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil tersebut didukung dengan teori pemangku kepentingan, dimana tanggung jawab sosial digunakan untuk meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat. Semakin baik citra perusahaan dianggap semakin kecil kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama **(H1) diterima**

4.3.2 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Hubungan Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan dengan Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi moderasi pada Tabel 4.10, variabel interaksi antara tanggung jawab sosial dan koneksi politik (CSRPM) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,014, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa koneksi politik mampu memoderasi hubungan antara tanggung jawab sosial dengan penghindaran

pajak. Selain itu, variabel interaksi (CSRPBM) memiliki koefisien regresi sebesar 0,020, yang menunjukkan bahwa koneksi politik memperlemah pengaruh negatif tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi koneksi politik yang dimiliki perusahaan, maka pengaruh tanggung jawab sosial terhadap penurunan praktik penghindaran pajak akan semakin lemah dibandingkan perusahaan dengan koneksi politik yang lebih rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rashid et al. (2022) yang menyatakan bahwa hubungan politik yang kuat mampu memperlemah pengaruh negatif tanggung jawab sosial perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memperoleh berbagai keuntungan, seperti kemudahan dalam memperoleh akses terhadap informasi, kebijakan pemerintah, serta hubungan yang lebih baik dengan regulator. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas tanggung jawab sosial sebagai mekanisme yang mendorong perusahaan untuk menekan praktik penghindaran pajak.

Temuan penelitian ini juga didukung oleh Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*) yang menyatakan bahwa pemerintah merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memiliki kedekatan dengan pemerintah sehingga memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya dan kebijakan yang dapat

mendukung kegiatan operasionalnya. Akibatnya, perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada pelaksanaan tanggung jawab sosial sebagai sarana memperoleh legitimasi dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Kondisi tersebut menyebabkan pengaruh tanggung jawab sosial dalam menekan praktik penghindaran pajak menjadi lebih lemah pada perusahaan yang memiliki koneksi politik yang kuat.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa koneksi politik berperan sebagai variabel moderasi yang memperlemah pengaruh negatif tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikansi variabel interaksi (CSR_{PBM}) sebesar 0,014 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, **Hipotesis kedua (H2) dinyatakan diterima.**

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tindakan perusahaan sering kali dianggap membingungkan oleh pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan pembayaran pajak merupakan dua bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat dan kontribusi kepada masyarakat. Oleh sebab itu perusahaan sektor perbankan dinilai tidak bertanggung jawab secara sosial apabila melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan sektor perbankan yang melakukan praktik penghindaran pajak lebih banyak berinvestasi ke dalam tanggung jawab sosial guna meningkatkan citra perusahaan serta menutupi dampak negatif dari penghindaran pajak. Dalam hal ini koneksi politik dianggap sebagai cara untuk melegitimasi risiko penghindaran pajak.

Penelitian ini meneliti tentang hubungan antara tanggung jawab sosial dan penghindaran pajak dengan efek moderasi koneksi politik. Hasil penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi pengeluaran tanggung jawab sosial perusahaan maka akan semakin rendah bank untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan teori pemangku kepentingan. Pengeluaran tanggung jawab sosial perusahaan dianggap sebagai citra para pemangku kepentingan dimata masyarakat. Semakin baik citra sebuah perusahaan dimata masyarakat cenderung tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa semakin tinggi ikatan politik suatu perusahaan maka semakin besar peluang untuk menjalankan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan politik yang kuat melemahkan pengaruh negatif tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penghindaran pajak.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang sekaligus dapat menjadi arahan bagi peneliti di masa yang akan datang antara lain :

1. Terdapat data outlier yang membuat jumlah sampel penelitian berkurang
2. Nilai adjusted R square dalam penelitian ini hanya sebesar 0,284 yang menunjukkan bahwa variabel tanggung jawab perusahaan, koneksi politik, ROA, ukuran perusahaan, usia perusahaan, dan BIG 4 secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan 28,4% variasi tax avoidance, sedangkan sisanya sebesar 71,6% dipengaruhi oleh faktor faktor lain di luar model penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat variabel-variabel lain yang lebih dominan dalam memengaruhi praktik tax avoidance namun belum tercakup dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya terfokus pada perusahaan sektor perbankan saja.
3. Rentang waktu penelitian yang digunakan hanya tiga tahun (2022–2024). Periode sesingkat ini berisiko belum menangkap siklus bisnis jangka panjang atau perubahan kebijakan pajak yang mungkin baru terlihat dampaknya dalam rentang lima tahun atau lebih.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka terdapat dua bentuk saran dalam penelitian ini. Saran yang dapat disampaikan yakni

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini salah satunya dengan cara menambah variabel lain yang belum pernah digunakan untuk melihat faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap variabel penghindaran pajak.
2. Pada penelitian ini menggunakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk itu, peneliti yang akan datang diharapkan dapat menggunakan atau menambah perusahaan – perusahaan sektor lain sehingga memberikan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dalam menganalisis pengaruh tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak
3. Perusahaan diharapkan lebih konservatif ketika melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan terkait dengan aktivitas penghindaran pajak dengan tujuan untuk menekan beban pajak agar lebih kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid , S., & Dammak, S. (2024). Corporate Social Responsibility And Tax Avoidance: The Case Of French Companies. *Journal of Financial Reporting and Accounting Vol. 20 No. 3/4*, 618-638.
- Adams, & Ferreira, D. (2022). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. *Journal of Financial Economics, Vol. 94 No. 2, pp. 291-309*.
- Adelfattah, T., & Aboud, A. (2020). Tax Avoidance, Corporate Governance, And Corporate Social Responsibility: The Case Of The Egyptian Capital Market. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*.
- Alasaadi, A. (2020). Financial-tax reporting conformity, tax avoidance and corporate social responsibility. *Journal of Financial Reporting and Accounting Vol. 18 No. 3, 2020 pp. 639-659*, 639-659.
- Ardina, P. (2023). Stakeholder Engagement In Sustainability Reporting By Fortune Global 500 Companies : A Call For Embeddedness. *Meditari Accountancy Research, 31(2)*, 344–365.
- Aulin, A., Muflikh, M., Ben, B., Silalahi, S., Purba, C. A., & Suwarsit, S. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum di Sektor Perbankan. 2(4), 387.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14201714>
- Carney, M., Estrin, S., Liang, Z., & Shapiro, D. (2018). National Institutional Systems, Foreign Ownership And Firm Performance: The Case Of Understudied Countries. *Journal of World Business 54 (2019) 244–257*, 244-257.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). SAGE Publications.

- Hanlon, M., Maydew, E. L., & Saavedra, D. (2024). Financial reporting and tax avoidance. *Annual Review of Financial Economics*, 16, 383–408.
- Dewi, S. (2023). Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia. *Volume 7 Nomor 3, Juli 2023*, 1930-1938.
- Domaneik, P., Pransnikar, J., & Svejnar, J. (2016). Political Connectedness, Corporate Governance And Firm Performance. *Journal of Business Ethics*, Vol. 139 No. 2, 411-428.
- Fanggidae, V., Maftuchan, A., Saputra, W., Martha, L., & Yulistiati. (2015). Policy Review 06 - Kelembagaan dan Tata Kelola Perpajakan Perlu Perubahan. *Perkumpulan PRAKARSA*.
- GFI. (2021). *Illicit financial flows*. Retrieved from Global Financial Integrity: <https://gfintegrity.org/issue/illicit-financial-flows/>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, N. (2025). Pajak Minimum Global Datang, Insentif Fiskal Baru Dibutuhkan. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/pajak-minimum-global-datang-insentif-fiskal-baru-dibutuhkan>
- Gilbert, D., & Rasche, A. (2008). Opportunities And Problems Of Standardized Ethics Initiatives A Stakeholder Theory Perspective. *Journal of Business Ethics*, Vol. 82, pp. 755-73.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics* Vol. 50 Nos 2/3, pp. 127-178.
- Hayes, A. F. (2022). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach (3rd ed.). Guilford Press.
- Hijriani, A., Latifah, S., & Setyawan, S. (2014). Pengaruh Koneksi Politik, Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

- (Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan Vol.4 No. 1, April 2014*, 525-533.
- Himawan, A. (2017). *Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp. 110 Triliun*. Retrieved from Suara.com:
<https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap>
- Justin, D., Malawat, R., & Wijaya, S. A. (2025). Analisis Regulasi Perizinan Dan 97 Kepemilikan Bank Di Indonesia (Upaya Memperkuat Ketahanan Sektor Keuangan Nasional). 10(12), 9–23.
- Koh, K., Li, H., & Tong, Y. H. (2023). *Corporate social responsibility (CSR) performance and stakeholder engagement: Evidence from the quantity and quality of CSR disclosures. Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 30(2), 504–517.
- Kim, C., & Zhang, L. (2021). *Corporate Political Connections And Tax Aggressiveness. Contemporary Accounting Research, Vol. 33 No. 1*, 78-114.
- Lumbanraja, T. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Perusahaan. *Jurakunman (Jurnal Akuntansi Dan Manajemen)*, 16(2), 181. <https://doi.org/10.48042/jurakunman.v16i2.236>
- Murtina, W., Putra, W., & Yustien, R. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 17/No. 2 Tahun 2020*, 47-66.
- OECD. (2022). Tax Morale II: Building Trust between Tax Administrations and Large Businesses. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/7587f25c-end>
- Oruc, L., & Sarikaya, M. (2011). Normative Stakeholder Theory In Relation To Ethics Of Care. *VOL. 7 NO. 3 2011*, 381-392.

- Ozbay, D., Adiguzel, H., Karahan Gokmen, M. (2023), L., & Sarikaya, M. (2011). Corporate social responsibility and tax avoidance: Channeling effect of family firms. *Journal of Corporate Accounting & Finance*, 34(3), 11–30. <https://doi.org/10.1002/jcaf.22610>
- Prasetya, M. I & Mutmainah, S (2024). PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2022.) *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(3), 1–9.
- Rashid, M., Begum, F., Hosain, S., & Said, J. (2022). Does CSR Affect Tax Avoidance? Moderating Role Of Political Connections In Bangladesh Banking Sector. *Social Responsibility Journal*, Vol. 20 No. 4, pp. 719-739.
- Rashid, & Hossain, S. (2022). Corporate Governance And IFSB Standard-4: Evidence From Islamic Banks In Bangladesh. *Vol. 15 No. 1*, 1-17.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2023). The determinants of corporate tax avoidance: Evidence from international settings. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*. (Pastikan volume, issue, halaman, dan DOI sesuai artikel yang Anda gunakan.)
- Rika Rudiatur, D. H. S. (2023). The effect of ownership structure and audit committee characteristics on tax avoidance with csr as intervening variable. 7, 1647–1664.
- Romadhon, F. (2020). Transparansi Pengungkapan Penghindaran Pajak Berdasarkan Perspektif. *Journal of Economics and Business Aseanomics* 5(1) 2020, 54-68, 54-68.
- Ruky, N., Putra, W., & Mansur, F. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada

- Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3).
- Santoso, T. B., & Muid, D. (2022). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 23(April), 74–79.
- Sikka, P. (2010). Smoke and mirrors: *Corporate social responsibility* and tax avoidance—A reply to Hasseldine and Morris. *In Accounting Forum*, Vol. 34 Nos 3/4, pp. 153-168., 15-28, 15-28.
- Simanjutak, R. (2014). *Kronologi Kasus Pajak BCA, Seret Hadi Jadi Tersangka*. Retrieved from Sindonews.com:
<https://nasional.sindonews.com/berita/856665/13/kronologi-kasus-pajak-bca-seret-hadi-jadi-tersangka>
- Tang, P., & Yang, S. (2020). How To Design Corporate Governance Structures To Enhance Corporate Social Responsibility In China's Mining State-Owned Enterprises? *Resources Policy*, Vol. 66,p. 101619.
- Uddin, S., Siddiqui, J., & Islam, M. (2018). Corporate Social Responsibility Disclosures, Traditionalism And Politics: A Story From A Traditional Setting. *Journal of Bussiness Ethics*, Vol. 151 No. 2, 409-428.
- Wardani, D., & Purwaningrum, R. (2018). PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *JRAK*, Volume 14, No 1 Pebruari 2018, 1-13.
- Warsono, & Ardianto, Y. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak dengan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi. (Studi pada perusahaan pertambangan di Indonesia). *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia* Vol. 2, Nomor 2, Feb 2023, 236-249.
- Young, M., Reksulak, M., & Shugart, W. (2001). The Political Economy Of The IRS. *Economics and Politics*, Vol. 13 No. 2, pp. 201-22.

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Daftar Nama Perusahaan Sampel

NO	KODE	BANK	TAHUN TERDAFTAR
1	AGRO	BANK RAYA INDONESIA TBK PT	08 Agt 2003
2	AGRS	BANK IBK INDONESIA TBK PT	22 Des 2014
3	ARTO	BANK JAGO TBK PT	12 Jan 2016
4	BABP	BANK MNC INTERNASIONAL TBK P	15 Jul 2002
5	BACA	BANK CAPITAL INDONESIA TBK	04 Okt 2007
6	BBCA	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	31 Mei 2000
7	BBHI	ALLO BANK INDONESIA TBK PT	12 Agt 2015
8	BBMD	BANK MESTIKA DHARMA TBK PT	08 Jul 2013
9	BBNI	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	25 Nov 1996
10	BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	10 Nov 2003
11	BBSI	KROM BANK INDONESIA TBK PT	07 Sep 2020
12	BBTN	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	17 Des 2009
13	BCIC	BANK JTRUST INDONESIA TBK PT	25 Jun 1997
14	BDMN	BANK DANAMON INDONESIA TBK	06 Des 1989
15	BGTG	BANK GANESHA TBK PT	12 Mei 2016
16	BINA	BANK INA PERDANA PT	16 Jan 2014
17	BJBR	BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TB	08 Jul 2010
18	BJTM	BPD JAWA TIMUR TBK PT	12 Jul 2012
19	BMRI	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	14 Jul 2003
20	BNBA	BANK BUMI ARTA TBK PT	01 Jun 2006
21	BNGA	BANK CIMB NIAGA TBK PT	29 Nov 1989
22	BNII	BANK MAYBANK INDONESIA TBK	21 Nov 1989
23	BNLI	BANK PERMATA TBK PT	15 Jan 1990
24	BRIS	BANK SYARIAH INDONESIA PERSE	09 Mei 2018
25	BSIM	BANK SINARMAS TBK PT	13 Des 2010
26	BSWD	BANK OF INDIA INDONESIA TBK	01 Mei 2002
27	BTPN	BANK SMBC INDONESIA TBK PT	12 Mar 2008
28	BTPS	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	08 Mei 2018
29	BVIC	BANK VICTORIA INTERNATIONAL PT	30 Jun 1999
30	DNAR	BANK OKE INDONESIA TBK PT	11 Jul 2014
31	INPC	BANK ARTHA GRAHA INTERNASION	23 Agt 1990
32	MASB	BANK MULTIARTA SENTOSA TBK P	30 Jun 2021
33	MAYA	BANK MAYAPADA INTL TBK PT	29 Agt 1997
34	MEGA	BANK MEGA TBK PT	17 Apr 2000
35	NISP	BANK OCBC NISP TBK PT	20 Okt 1994
36	NOBU	BANK NATIONALNOBU TBK PT	20 Mei 2013
37	PNBN	BANK PAN INDONESIA TBK PT	29 Des 1982
38	PNBS	BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK	15 Jan 2014

Lampiran 2 Tabulasi Data Variabel

Lampiran Data BTB

NO	KODE	BANK	2022	2023	2024
1	AGRO	BANK RAYA INDONESIA TBK PT	-0.0259	-0.0277	0.0027
2	AGRS	BANK IBK INDONESIA TBK PT	0.0073	0.0107	-0.0006
3	ARTO	BANK JAGO TBK PT	0.0000	-0.0001	-0.0018
4	BABP	BANK MNC INTERNASIONAL TBK P	-0.0182	-0.0042	0.0041
5	BACA	BANK CAPITAL INDONESIA TBK	0.0000	0.0000	-0.0005
6	BBCA	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	0.0005	0.0055	0.0051
7	BBHI	ALLO BANK INDONESIA TBK PT	-0.0020	-0.0015	-0.0033
8	BBMD	BANK MESTIKA DHARMA TBK PT	0.0000	-0.0001	-0.0009
9	BBNI	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	0.0004	0.0046	0.0038
10	BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	0.0025	0.0019	0.0001
11	BBSI	KROM BANK INDONESIA TBK PT	-0.0007	-0.0022	-0.0007
12	BBTN	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	0.0002	0.0009	0.0006
13	BCIC	BANK JTRUST INDONESIA TBK PT	0.0067	0.0013	-0.0091
14	BDMN	BANK DANAMON INDONESIA TBK	-0.0001	-0.0002	0.0003
15	BGTG	BANK GANESHA TBK PT	0.0006	0.0017	0.0013
16	BINA	BANK INA PERDANA PT	-0.0003	-0.0001	-0.0004
17	BJBR	BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TB	0.0008	0.0005	0.0013
18	BJTM	BPD JAWA TIMUR TBK PT	-0.0018	-0.0003	-0.0006
19	BMRI	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	0.0022	0.0038	0.0026
20	BNBA	BANK BUMI ARTA TBK PT	-0.0005	-0.0002	-0.0005
21	BNGA	BANK CIMB NIAGA TBK PT	-0.0005	0.0004	0.0011
22	BNII	BANK MAYBANK INDONESIA TBK	-0.0016	-0.0005	-0.0011
23	BNLI	BANK PERMATA TBK PT	-0.0005	-0.0005	-0.0006
24	BRIS	BANK SYARIAH INDONESIA PERSE	-0.0023	-0.0028	-0.0026
25	BSIM	BANK SINARMAS TBK PT	0.0005	0.0016	0.0023
26	BSWD	BANK OF INDIA INDONESIA TBK	0.0084	0.0022	-0.0018
27	BTPN	BANK SMBC INDONESIA TBK PT	-0.0005	-0.0003	0.0003
28	BTPS	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	-0.0006	0.0009	0.0012
29	BVIC	BANK VICTORIA INTERNATIONAL PT	-0.0092	0.0001	0.0003
30	DNAR	BANK OKE INDONESIA TBK PT	-0.0008	-0.0007	-0.0012
31	INPC	BANK ARTHA GRAHA INTERNASION	0.0002	0.0007	0.0007
32	MASB	BANK MULTIARTA SENTOSA TBK P	-0.0006	0.0016	0.0000
33	MAYA	BANK MAYAPADA INTL TBK PT	-0.0005	-0.0007	-0.0006
34	MEGA	BANK MEGA TBK PT	0.0042	0.0042	0.0031
35	NISP	BANK OCBC NISP TBK PT	0.0007	0.0009	0.0032
36	NOBU	BANK NATIONALNOBU TBK PT	-0.0002	-0.0005	-0.0004
37	PNBN	BANK PAN INDONESIA TBK PT	0.0018	0.0012	0.0003
38	PNBS	BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK	0.0160	0.0112	0.0141

DAFTAR TANGGUNG JAWAB SOSIAL

NO	KODE	BANK	2022	2023	2024
1	AGRO	BANK RAYA INDONESIA TBK PT	0.3590	0.3590	0.6325
2	AGRS	BANK IBK INDONESIA TBK PT	0.3846	0.3590	0.3590
3	ARTO	BANK JAGO TBK PT	0.4701	0.4359	0.3932
4	BABP	BANK MNC INTERNASIONAL TBK P	0.5385	0.3504	0.5385
5	BACA	BANK CAPITAL INDONESIA TBK	0.4188	0.4188	0.3932
6	BBCA	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	0.5299	0.5556	0.5897
7	BBHI	ALLO BANK INDONESIA TBK PT	0.3932	0.3846	0.4274
8	BBMD	BANK MESTIKA DHARMA TBK PT	0.4701	0.4359	0.4188
9	BBNI	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	0.5641	0.9402	0.9402
10	BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	0.5812	0.5812	0.7521
11	BBSI	KROM BANK INDONESIA TBK PT	0.3590	0.6325	0.3419
12	BBTN	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	0.7863	0.8376	0.8120
13	BCIC	BANK JTRUST INDONESIA TBK PT	0.6239	0.6068	0.3504
14	BDMN	BANK DANAMON INDONESIA TBK	0.4701	0.4786	0.4786
15	BGTG	BANK GANESHA TBK PT	0.6239	0.6325	0.6410
16	BINA	BANK INA PERDANA PT	0.4701	0.4359	0.4359
17	BJBR	BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TB	0.5726	0.5983	0.6239
18	BJTM	BPD JAWA TIMUR TBK PT	0.3932	0.4957	0.4786
19	BMRI	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	0.6923	0.6154	0.7350
20	BNBA	BANK BUMI ARTA TBK PT	0.3761	0.4274	0.4274
21	BNGA	BANK CIMB NIAGA TBK PT	0.4530	0.7778	0.7778
22	BNII	BANK MAYBANK INDONESIA TBK	0.5641	0.8120	0.9573
23	BNLI	BANK PERMATA TBK PT	0.4103	0.4103	0.4017
24	BRIS	BANK SYARIAH INDONESIA PERSE	0.6410	0.6410	0.7607
25	BSIM	BANK SINARMAS TBK PT	0.5128	0.5299	0.5556
26	BSWD	BANK OF INDIA INDONESIA TBK	0.5214	0.5214	0.4701
27	BTPN	BANK SMBC INDONESIA TBK PT	0.4957	0.5128	0.5641
28	BTPS	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	0.4188	0.5214	0.5726
29	BVIC	BANK VICTORIA INTERNATION PT	0.3932	0.5470	0.5470
30	DNAR	BANK OKE INDONESIA TBK PT	0.4444	0.4444	0.4359
31	INPC	BANK ARTHA GRAHA INTERNASION	0.6239	0.6239	0.6239
32	MASB	BANK MULTIARTA SENTOSA TBK P	0.4274	0.5128	0.5214
33	MAYA	BANK MAYAPADA INTL TBK PT	0.4274	0.4274	0.4359
34	MEGA	BANK MEGA TBK PT	0.5641	0.5385	0.6325
35	NISP	BANK OCBC NISP TBK PT	0.4957	0.5214	0.5043
36	NOBU	BANK NATIONALNOBU TBK PT	0.4957	0.4957	0.5299
37	PNBN	BANK PAN INDONESIA TBK PT	0.3675	0.4017	0.4017
38	PNBS	BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK	0.4786	0.4786	0.4786

DATA KONEKSI POLITIK

NO	KODE	BANK	2022	2023	2024
1	AGRO	BANK RAYA INDONESIA TBK PT	0.09091	0.10000	0.00000
2	AGRS	BANK IBK INDONESIA TBK PT	0.00000	0.00000	0.11111
3	ARTO	BANK JAGO TBK PT	0.00000	0.00000	0.10000
4	BABP	BANK MNC INTERNASIONAL TBK P	0.00000	0.00000	0.00000
5	BACA	BANK CAPITAL INDONESIA TBK	0.00000	0.17647	0.30000
6	BBCA	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	0.11765	0.11765	0.11765
7	BBHI	ALLO BANK INDONESIA TBK PT	0.12500	0.12500	0.12500
8	BBMD	BANK MESTIKA DHARMA TBK PT	0.00000	0.00000	0.00000
9	BBNI	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	0.31818	0.30435	0.30435
10	BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	0.34615	0.34783	0.34783
11	BBSI	KROM BANK INDONESIA TBK PT	0.00000	0.00000	0.00000
12	BBTN	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	0.31579	0.33333	0.30000
13	BCIC	BANK JTRUST INDONESIA TBK PT	0.00000	0.00000	0.11111
14	BDMN	BANK DANAMON INDONESIA TBK	0.16667	0.13333	0.13333
15	BGTG	BANK GANESHA TBK PT	0.00000	0.00000	0.00000
16	BINA	BANK INA PERDANA PT	0.00000	0.00000	0.00000
17	BJBR	BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TB	0.25000	0.25000	0.18750
18	BJTM	BPD JAWA TIMUR TBK PT	0.21429	0.30769	0.23077
19	BMRI	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	0.40909	0.43478	0.46154
20	BNBA	BANK BUMI ARTA TBK PT	0.00000	0.00000	0.00000
21	BNGA	BANK CIMB NIAGA TBK PT	0.25000	0.17647	0.17647
22	BNII	BANK MAYBANK INDONESIA TBK	0.11765	0.11765	0.10526
23	BNLI	BANK PERMATA TBK PT	0.12500	0.18750	0.18750
24	BRIS	BANK SYARIAH INDONESIA PERSE	0.31579	0.30000	0.29167
25	BSIM	BANK SINARMAS TBK PT	0.00000	0.00000	0.00000
26	BSWD	BANK OF INDIA INDONESIA TBK	0.00000	0.00000	0.00000
27	BTPN	BANK SMBC INDONESIA TBK PT	0.07143	0.00000	0.00000
28	BTPS	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	0.22222	0.11111	0.11111
29	BVIC	BANK VICTORIA INTERNATION PT	0.00000	0.00000	0.00000
30	DNAR	BANK OKE INDONESIA TBK PT	0.00000	0.00000	0.00000
31	INPC	BANK ARTHA GRAHA INTERNASION	0.00000	0.00000	0.00000
32	MASB	BANK MULTIARTA SENTOSA TBK P	0.00000	0.00000	0.00000
33	MAYA	BANK MAYAPADA INTL TBK PT	0.10000	0.11111	0.10000
34	MEGA	BANK MEGA TBK PT	0.18182	0.23077	0.25000
35	NISP	BANK OCBC NISP TBK PT	0.00000	0.00000	0.00000
36	NOBU	BANK NATIONALNOBU TBK PT	0.00000	0.00000	0.00000
37	PNBN	BANK PAN INDONESIA TBK PT	0.00000	0.06667	0.06667
38	PNBS	BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK	0.00000	0.00000	0.00000

DATA VARIABEL KONTROL

NO	KODE	BANK	SIZE			LEV			ROA			AGE			BIG4		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	AGRO	BANK RAYA INDONESIA TBK PT	13.143	13.095	13.118	0.723	0.725	0.737	0.001	0.002	0.004	24	25	26	1	1	1
2	AGRS	BANK IBK INDONESIA TBK PT	13.263	13.287	13.302	0.772	0.723	0.722	0.006	0.009	0.011	49	50	51	0	0	0
3	ARTO	BANK JAGO TBK PT	13.230	13.328	13.455	0.513	0.608	0.702	0.001	0.003	0.005	30	31	32	1	1	1
4	BABP	BANK MNC INTERNASIONAL TBK P	13.227	13.259	13.320	0.839	0.802	0.825	0.003	0.004	0.004	33	34	35	0	0	0
5	BACA	BANK CAPITAL INDONESIA TBK	13.314	13.285	13.354	0.841	0.824	0.707	0.002	0.005	0.005	33	34	35	0	0	0
6	BBCA	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	16.119	15.149	15.161	0.827	0.822	0.812	0.031	0.035	0.038	67	68	69	1	1	1
7	BBHI	ALLO BANK INDONESIA TBK PT	13.044	13.106	13.146	0.420	0.460	0.480	0.024	0.035	0.033	30	31	32	0	0	0
8	BBMD	BANK MESTIKA DHARMA TBK PT	13.220	13.206	13.220	0.726	0.695	0.693	0.032	0.026	0.024	67	68	69	0	0	0
9	BBNI	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	16.001	15.036	15.053	0.864	0.858	0.852	0.018	0.019	0.019	76	77	78	1	1	1
10	BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	15.271	15.293	15.300	0.837	0.839	0.838	0.027	0.031	0.030	127	128	129	1	1	1
11	BBSI	KROM BANK INDONESIA TBK PT	12.520	12.561	12.823	0.075	0.100	0.100	0.023	0.036	0.019	65	66	67	0	0	0
12	BBTN	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	14.604	14.642	14.672	0.398	0.342	0.376	0.008	0.008	0.006	125	126	127	1	1	1
13	BCIC	BANK JTRUST INDONESIA TBK PT	13.527	13.594	13.605	0.889	0.904	0.906	0.003	0.001	0.000	33	34	35	0	0	0
14	BDMN	BANK DANAMON INDONESIA TBK	14.296	14.345	14.394	0.760	0.774	0.768	0.017	0.016	0.014	66	67	68	1	1	1
15	BGTG	BANK GANESHA TBK PT	12.953	12.973	13.015	0.650	0.655	0.667	0.005	0.011	0.019	32	33	34	1	1	1
16	BINA	BANK INA PERDANA PT	13.313	13.387	13.388	0.840	0.854	0.852	0.008	0.009	0.003	32	33	34	1	1	1
17	BJBR	BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TB	14.258	14.275	14.342	0.872	0.869	0.865	0.013	0.009	0.006	61	62	63	0	0	0
18	BJTM	BPD JAWA TIMUR TBK PT	14.013	14.016	14.072	0.871	0.860	0.749	0.015	0.014	0.011	61	62	63	0	0	0
19	BMRI	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	15.299	15.337	15.385	0.775	0.764	0.766	0.021	0.025	0.023	24	25	26	1	1	1
20	BNBA	BANK BUMI ARTA TBK PT	12.914	12.903	12.913	0.625	0.609	0.610	0.005	0.006	0.008	55	56	57	1	1	1
21	BNGA	BANK CIMB NIAGA TBK PT	14.487	14.524	14.557	0.852	0.852	0.918	0.016	0.019	0.019	67	68	69	1	1	1
22	BNII	BANK MAYBANK INDONESIA TBK	14.206	14.235	14.295	0.816	0.821	0.842	0.009	0.010	0.006	63	64	65	1	1	1

23	BNLI	BANK PERMATA TBK PT	14.407	14.411	14.413	0.853	0.845	0.836	0.008	0.010	0.014	65	66	67	1	1	1
24	BRIS	BANK SYARIAH INDONESIA PERSE	14.485	14.549	14.611	0.241	0.247	0.259	0.014	0.016	0.017	53	54	55	1	1	1
25	BSIM	BANK SINARMAS TBK PT	13.675	13.721	13.745	0.708	0.718	0.721	0.005	0.001	0.005	33	34	35	0	0	0
26	BSWD	BANK OF INDIA INDONESIA TBK	12.782	12.787	12.833	0.450	0.449	0.493	0.003	0.008	0.012	54	55	56	0	0	0
27	BTPN	BANK SMBC INDONESIA TBK PT	14.320	14.304	14.382	0.765	0.746	0.733	0.015	0.012	0.012	64	65	66	1	1	1
28	BTPS	BANK BTPN SYARIAH TBK PT	13.326	13.331	13.337	0.138	0.128	0.130	0.084	0.050	0.049	64	65	66	1	1	1
29	BVIC	BANK VICTORIA INTERNATIONAL PT	13.414	13.472	13.492	0.857	0.915	0.831	0.009	0.003	0.004	30	31	32	1	1	1
30	DNAR	BANK OKE INDONESIA TBK PT	13.008	13.044	13.074	0.651	0.744	0.631	0.001	0.003	0.004	42	43	44	0	0	0
31	INPC	BANK ARTHA GRAHA INTERNASION	13.405	13.417	13.479	0.843	0.840	0.856	0.002	0.006	0.005	49	50	51	0	0	0
32	MASB	BANK MULTIARTA SENTOSA TBK P	13.328	13.438	13.461	0.839	0.866	0.865	0.014	0.009	0.007	30	31	32	0	0	0
33	MAYA	BANK MAYAPADA INTL TBK PT	14.132	14.151	14.177	0.898	0.888	0.887	0.000	0.000	0.000	33	34	35	0	0	0
34	MEGA	BANK MEGA TBK PT	14.152	14.121	14.130	0.854	0.835	0.843	0.029	0.027	0.020	53	54	55	0	0	0
35	NISP	BANK OCBC NISP TBK PT	14.377	14.398	14.449	0.857	0.851	0.855	0.014	0.016	0.017	81	82	83	1	1	1
36	NOBU	BANK NATIONALNOBU TBK PT	13.345	13.425	13.523	0.915	0.875	0.891	0.005	0.005	0.010	33	34	35	0	0	0
37	PNBN	BANK PAN INDONESIA TBK PT	14.327	14.346	14.387	0.744	0.712	0.722	0.014	0.011	0.011	51	52	53	0	0	0
38	PNBS	BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK	13.170	13.239	13.226	0.831	0.840	0.828	0.017	0.013	0.008	50	51	52	1	1	1

Lampiran 3 Hasil Olah Data SPSS

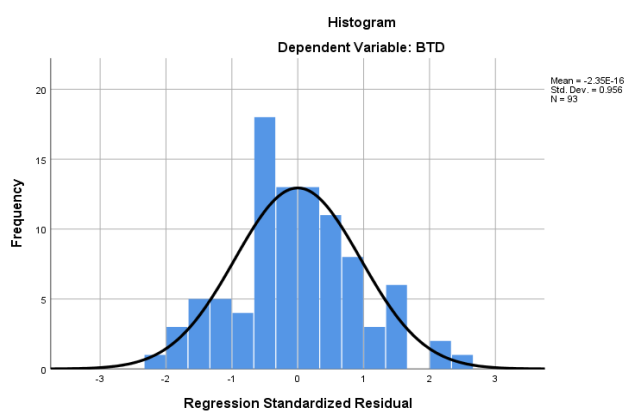
A. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BTD	93	-0.0028	0.0046	0.000167	0.0013617
CSR	93	0.3419	0.9573	0.537912	0.1397639
PBM	93	0.0000	0.4615	0.109132	0.1334150
CSRPBM	93	-0.0152	0.0785	0.009590	0.0192430
SIZE	93	12.5203	16.1188	13.907977	0.7830246
LEV	93	0.0749	0.9181	0.701580	0.2213330
ROA	93	0.0002	0.0841	0.013778	0.0125368
AGE	93	24	129	55.80	24.466
BIG4	93	0	1	0.54	0.501
Valid N (listwise)	93				

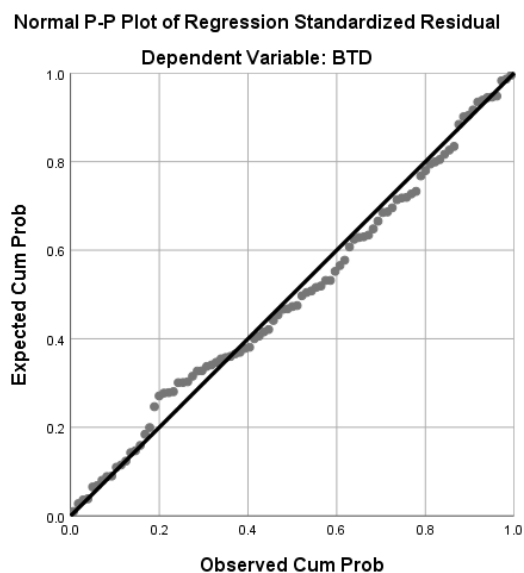
B. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

a. Uji Normalitas Grafik Histogram



b. Uji Normalitas dengan Grafik Normal P-P Plot *standardized residual*



c. Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smienov(k-s)

Tabel 4.3
Hasil Uji Statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.00110066
Most Extreme Differences	Absolute	0.068
	Positive	0.058
	Negative	-0.068
Test Statistic		0.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	CSR	0.580	1.725
	PBM	0.308	3.243
	CSRPBM	0.604	1.657
	SIZE	0.260	3.849
	LEV	0.471	2.122
	ROA	0.620	1.614
	AGE	0.656	1.525
	BIG4	0.726	1.376
a. Dependent Variable: BTD			

3. Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi Menggunakan Metode *Run Test*

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-0.00008
Cases < Test Value	46
Cases >= Test Value	47
Total Cases	93
Number of Runs	51
Z	0.731
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.465
a. Median	

C. Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi

1. Koefisien

Tabel 4.7

Koefisin Regresi

Coefficients^a						
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.001	0.004		-0.311	0.756
	CSR	-0.003	-0.001	-0.287	-2.473	0.015
	PBM	0.001	0.002	0.071	0.449	0.655
	CSRPBM	0.020	0.008	0.285	2.508	0.014
	SIZE	0.000	0.000	-0.116	-0.672	0.503
	LEV	0.003	0.001	0.503	3.916	0.000
	ROA	0.032	0.012	0.296	2.645	0.010
	AGE	-3.261E-06	0.000	-0.059	-0.538	0.592
	BIG4	0.000	0.000	-0.052	-0.504	0.615
a. Dependent Variable: BTD						

2. Model Summary

Tabel 4.9

Model Summary Regresi Moderasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.589 ^a	0.347	0.284	0.0011519
a. Predictors: (Constant), BIG4, LEV, CSRPBM, AGE, ROA, CSR, PBM, SIZE				
b. Dependent Variable: BTD				